

GRATIS

EDISI MARET-MEI 2014

COKELAT

The advancement of communication



**BANGKITNYA
PARA PENGHASIL
KAKAO INDONESIA:
sebuah laporan lengkap**



CATATAN *editor*

SEBAGAI SALAH SATU KOMODITAS ANDALAN INDONESIA, kakao mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penyumbang devisa negara peringkat ketiga di sektor perkebunan. Pada tahun 2012, komoditas kakao telah menyumbang devisa sebesar USD1,053,446,947 dari ekspor biji kakao dan produk kakao olahan*.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memajukan industri hilir di dalam negeri terbukti membawa hasil dalam pengembangan industri kakao Indonesia. Salah satunya dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) demi menjaga mutu bubuk kakao yang beredar di dalam negeri. Program industri hilir yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian juga mampu mengangkat industri kakao nasional sehingga dapat bersaing, baik di pasar domestik maupun global, serta memberikan sumbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita.

Saat ini pertumbuhan permintaan kakao dunia sekitar empat juta ton per tahun. Data International Cocoa Organization (ICCO) menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, permintaan kakao tumbuh rata-rata 5% per tahun. Di masa depan, komoditas kakao memiliki daya yang besar untuk dikembangkan. Diperkirakan, konsumsi kakao di Indonesia, India, dan Cina akan mencapai 1 kg / kapita / tahun sehingga akan ada permintaan tambahan sekitar 2,2 juta ton biji kakao per tahun.

Dalam edisi ini akan dipaparkan daerah-daerah yang sedang beranjak untuk menghasilkan kakao secara besar-besaran, serta kebijakan yang telah mereka keluarkan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Anda juga dapat melihat industri kecil yang semakin tumbuh subur dan banyaknya investor asing yang membangun pabrik baru di Indonesia. Bentuk-bentuk peningkatan produksi dan produktivitas berkesinambungan juga dapat dibaca dalam edisi ini.

Kita semua berharap, dengan peran serta pemerintah, Indonesia akan menjadi penghasil kakao terbesar sekaligus menjadi konsumen cokelat nomor satu di dunia.

Selamat membaca!

*Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, September 2013.



PENANGGUNG JAWAB : Rini Indrayanti
PEMIMPIN REDAKSI : Igor Rangga
DESAIN : Frisca Imelda

SEKRETARIAT:

Cocoa Sustainability Partnership (CSP)
Graha Pena Lt.8 Suite 804-805
Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar
Tel: 0411 436 020
Fax: 0411 436 020
Email: communicationcsp@outlook.com



Cocoa Sustainability Partnership



18

Menemukan kembali kejayaan yang hilang.



8

Berkembang bersama banyak pihak.

Daftar Isi

- 6 Ujung Tombak Pengembangan Kakao Flores
- 15 Siapa Paling Banyak Makan Cokelat?
- 16 Gencar Meningkatkan Kapasitas Petani
- 25 Membangun Kerja Sama Antara Pemegang Kepentingan
- 26 Berpotensi Menjadi Penghasil Kakao Terbesar
- 28 Mempermudah Petani Membuka Usaha
- 30 Evaluasi dan Pembelajaran Sertifikasi Sampai Desember 2013
- 32 Evaluasi dan Rencana ke Depan



12

Semua dilakukan demi meningkatkan produktivitas.



22

Mengawal industri kakao Indonesia.





LAPORAN UTAMA

8

Sumatra Barat

12

Padang Pariaman

18

Sulawesi Barat

22

Sulawesi Selatan

Kemampuan kabupaten ini untuk menghasilkan kakao bisa dibilang lebih besar dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu adakah strategi pemerintah daerah untuk menggali kemampuan tersebut? Baca hasil perbincangan *Cokelat* dengan Bupati Drs. Yosef Ansar Rera, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistan) Ir. Mauritius T. Da Cunha di Kota Maumere baru-baru ini.

KABUPATEN SIKKA

UJUNG TOMBAK PENGEMBANGAN KAKAO FLORES

ADA TIGA SEKTOR UNGGULAN yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka, yaitu sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian dan perkebunan (dengan tiga komoditas seperti jambu mete, kelapa, dan kakao), serta sektor pariwisata. Bupati mengatakan, program-program yang dikembangkan Kabupaten Sikka untuk mendukung tiga sektor tersebut dalam lima tahun ke depan, sebenarnya dibuat berdasarkan apa yang telah dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Kabupaten Sikka bisa dibilang menjadi langkah awal pengembangan kakao Flores, terlihat dengan adanya kerja



sama antara pemerintah daerah dengan program Support of Poor Small Cocoa Farmer (SPSCF). Program itu sendiri sempat didukung oleh Yayasan Sahabat Cipta, World Vision Indonesia, Hille Foundation, Swisscontact, Mars Incorporated, dan VECO Indonesia. “Di masa depan, setelah Kabupaten Sikka, kabupaten lain pun bisa ikut andil dalam pengembangan kakao,” kata Bupati.

MEMBANGUNKAN LAHAN TIDUR

Kakao memang memiliki kesempatan lebih besar di Kabu-

paten Sikka dibanding dengan kabupaten lain di Pulau Flores. Mengapa? Karena keadaan lahan di Sikka lebih cocok untuk bertanam kakao, sehingga pusat-pusat penghasil kakao lebih banyak dijumpai di Kabupaten Sikka. Bupati mengatakan bahwa masih banyak lahan tidur yang siap dikembangkan untuk perkebunan kakao, dan pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah untuk membukanya. "Lewat SPSCF kami akan mengawali dari perluasan lahan, kemudian peningkatan produksi, lalu pengolahan, dan pemasaran," kata Bupati.

Lahan tidur yang dimaksud Bupati sebagian besar terdapat di barat Kabupaten Sikka, saat ini jumlahnya sekitar 21,000 sampai 22,000 hektar. Sementara itu menurut data Dinas Pertanian dan Perkebunan, saat Gerakan Nasional (Gernas) Kakao dimulai pada 2009, Kabupaten Sikka juga menjatahkan sekitar 10,000 hektar lahan siap garap. "Karena sangat luas, baru 3,000 hektar lahan Gernas yang digarap sampai akhir 2013," kata Kadistan.

Jika melihat kemampuan kabupaten lain di Flores untuk menghasilkan kakao, sebenarnya Kabupaten Ende memiliki daya yang hampir sama dengan Sikka untuk menghasilkan kakao dalam jumlah besar. Lahan untuk mengembangkan kakao di Ende juga sangat luas. Namun karena sarana pengangkutan masih terbatas, maka pemasaran kakao Ende sering terhambat. "Jalur pemasarannya masih harus melalui Maumere, tiga jam perjalanan melewati bukit dari Ende," kata Bupati.

Dalam membantu meningkatkan produksi kakao di Sikka, Bupati telah menyiapkan beberapa kebijakan, seperti yang telah disebutkan tadi, dimulai dari perluasan lahan. Kemudian dilakukan penanaman baru, membuka jalur pupuk yang lebih baik, dan perbaikan proses pascapanen. Sampai saat ini pe-

tani Sikka belum banyak yang melakukan proses pascapanen seperti peragian, meski beberapa kelompok sudah melakukan proses pascapanen lain seperti pembuatan bubuk cokelat. "Untuk pembuatan kemasan kami harus belajar lagi, agar tidak kalah bagus dengan kemasan cokelat dari daerah lain," kata Bupati.

PEMBANGUNAN KAWASAN

Selain kebijakan, Kabupaten Sikka rupanya merencanakan suatu program yang disebut Gelora atau Gerakan Ekonomi Rakyat (Gelora). Bupati mengatakan bahwa pengembangan kakao di Sikka tidak bisa melulu mengandalkan pemerintah dan para anggotanya, tapi masyarakat juga harus andil. "Melalui Gelora, masyarakat dirangsang untuk membuat prakarsa. Setelah prakarsa terbentuk, pemerintah tinggal memberikan fasilitasnya," kata Bupati. Untuk Kabupaten Sikka, Gelora masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan akan dilaksanakan mulai tahun ini.

Pembangunan kawasan ikut diterapkan di Kabupaten Sikka, dengan membagi kabupaten ini ke dalam tiga gugus, yaitu gugus barat (Kecamatan Mego, Paga, dan Tanawawo), gugus tengah (Kecamatan Mika, Koting, Lele, dan Lela), serta gugus timur (Hewokloang, Bola, Doreng, dan Mapitara). Menurut Kadisbun, pembagian kawasan ini nantinya akan ditangani dari hulu sampai hilir, seperti persiapan produksi, pascapanen, pengolahan, sampai pemasaran, dan akan berpusat di Kota Maumere. "Kami membagi lagi tiap gugus ini menjadi kelompok-kelompok kecil demi mendapatkan data yang cermat, berapa lahan yang sudah digarap, dan berapa petani yang terlibat," kata Kadisbun.

Bupati mengatakan, memulai pengembangan kakao Flores dari Kabupaten Sikka sangat tepat, melihat dari suburnya lahan, letak geografi, dan adanya pelabuhan laut. Selain itu, Bupati yakin bahwa penerapan SPSCF di Kabupaten Sikka akan membuka kesempatan bagi masyarakatnya untuk meningkatkan pendapatan. "Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah daerah siap membantu dan bekerja sama, tidak hanya sekarang tapi sampai seterusnya," kata Bupati menutup pembicaraan. ☉

Foto: Igor Ranga / Rini Indrayanti.



Bupati Drs. Yosef Ansar Rera.



Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Ir. Mauritius T. Da Cunha.

PROVINSI SUMATRA BARAT

BERKEMBANG BERSAMA BANYAK PIHAK



Pak Edi dengan hasil kebunnya.

Sumatra Barat (Sumbar) mengenal kakao sama usianya seperti provinsi lain di Indonesia, yaitu sejak 1979 ketika Direktorat Jenderal Perkebunan melancarkan Program Pengembangan Perkebunan. Saat itu hanya satu kabupaten yang dikembangkan menjadi perkebunan kakao.

SAYANGNYA SETELAH 1979 tidak banyak yang terdengar mengenai kakao Sumbar, berapa produksinya, apa saja yang dihasilkan, berapa luas lahannya, jarang ada yang tahu. Sampai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan Sumbar sebagai pusat penghasil kakao Indonesia bagian barat pada 2006.

Pencanangan tersebut rupanya membuat sektor kakao di provinsi ini kembali menggeliat. Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi sangat mendukung pencanangan tersebut dengan mengganti semua bibit asalan dengan bibit kloning. Mereka pun melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota, memberikan pemahaman kepada petani bahwa menanam kakao bisa menambah penghasilan.

Pelan tapi pasti, luas lahan kakao Sumbar menjadi 139,000 ha dari hanya 25,000 ha pada 2006. Provinsi ini pun berhasil menghasilkan

Kepala Dinas Ir. Fajarudin.



biji kakao sampai 69,000 ton pada 2012, dengan daerah penghasil tersebar mulai dari Padang Pariaman, Lima Puluh Koto, sampai Pasaman yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara. Meski begitu, penanaman dalam skala lebih besar memang belum bisa dipenuhi, "Karena usaha petani di Sumbar sangat beragam, ada yang punya sawah, kebun hortikultura, ternak, dan ikan," kata Ir. Fajarudin, Kelapa Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Barat yang ditemui di kantornya akhir Januari lalu.

Kebun kakao di Sumbar umumnya memang dikelola petani kecil, dengan luas lahan yang terbatas, karena kebanyakan petani tinggal di kawasan Bukit Barisan. Untuk mengatasi masalah itu, petani biasanya mengakali dengan menanam kakao di kebun kelapa, yang tentunya memberikan keuntungan ganda. "Dari satu kebun dihasilkan dua komoditas, pohon kelapa pun melindungi pohon kakao dari sinar matahari langsung," kata Fajarudin.

NAGARI MODEL KAKAO

Untuk mendukung pencanangan Sumbar sebagai penghasil kakao terbesar di

Indonesia bagian barat, Disbun rupanya punya cara sendiri untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Fajaruddin mengatakan bahwa petani kakao Sumbar saat ini sangat butuh contoh dan praktik, teori tidak menarik bagi mereka. Disbun mencermati keadaan tersebut dengan merancang suatu pembinaan yang bisa membuat petani menerima ilmu secara langsung, cepat, dan tepat. "Kami juga melihat masih banyak petani yang hanya menanam, perawatan diserahkan kepada Tuhan," kata Fajarudin.

Disbun kemudian menetapkan tiga tema pembinaan, yaitu pemeliharaan, pascapanen, dan pengolahan. Disbun tidak lagi berpusat pada perluasan lahan, karena Disbun yakin, tanaman kakao yang dirawat dengan baik akan memiliki biji lebih banyak.

Tiga tema utama tadi kemudian diwujudkan dalam kegiatan peningkatan mutu tanaman, pemangkasan, sekolah lapangan, dan yang terbaru, program Nagari Model Kakao (NMK). Nagari Model Kakao adalah program pengembangan nagari (desa) mandiri yang dirancang secara menyeluruh dan menyatu sesuai permasalahan yang ada. NMK me-

Disbun tidak lagi berpusat pada perluasan lahan, karena Disbun yakin, *tanaman kakao yang dirawat dengan baik akan memiliki biji lebih banyak.*

LIMA PROGRAM UTAMA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATRA BARAT

1. Peningkatan produksi, mutu, dan produktivitas tanaman
2. Peningkatan mutu hasil dan pascapanen
3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
4. Menghidupkan kembali lahan terlantar
5. Pengembangan kawasan produksi

libatkan beberapa pihak seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatra Barat, dan Fakultas Pertanian Universitas Andalas (UNAND), Padang, sehingga diharapkan komoditas kakao bisa menjadi motor penggerak ekonomi nagari, yang kemudian mewujudkan masyarakat sejahtera. Dampaknya pun diharapkan dapat dilihat secara luas oleh nagari-nagari dan kecamatan di sekitarnya.

Fajarudin mengatakan bahwa selama ini pembinaan ke petani biasanya dibedakan berdasarkan tahun. Misalnya tahun pertama diberikan pembinaan mengenai pengendalian hama dan penyakit, tahun kedua mengenai pemangkasan, tahun ketiga mengenai pengolahan hasil. "Saat NMK dimulai, pembinaan kami lakukan sekaligus, termasuk pemberdayaan petani, pengendalian hama, pengolahan, dan sebagainya," kata Fajarudin.

Menurut Ir. Yusniar, M.P. (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Provinsi Sumbar), sejauh ini ada sekitar 175 sampai 200 mahasiswa Fakultas Pertanian UNAND yang rutin mendukung dalam setiap program yang dijalankan. Pada tahap awal, mahasiswa mendapat bimbingan dari Disbun tujuh sampai delapan kali pertemuan, setelah itu mahasiswa akan dilepas sendiri ke lapangan. Mahasiswa yang baru pertama kali ikut, diberi tugas melakukan pemangkasan dan pengendalian hama, yang merupakan kegiatan yang paling penting sekarang ini di Sumbar.

Setelah pemangkasan dan pengendalian hama, mahasiswa mulai dilatih melakukan sambung pucuk. "Dengan terjun langsung ke NMK, kecintaan dan minat mahasiswa terhadap kakao semakin kuat," kata Fajarudin. Kepala Dinas menambahkan bahwa melalui kerja sama dengan mahasiswa, pendampingan ke petani bisa dilakukan sesering mungkin dan kebun kakao akan terjaga kesehatannya.

70 BIJI PER 100 GR

Nagari Model Kakao membawa dampak luar biasa dalam industri kakao Sumbar. Klon baru berhasil diciptakan di kebun milik Edi Syafianto, petani kakao asal Payakumbuh, yang kebunnya langsung menjadi kebun percontohan tidak hanya bagi Sumbar, tapi juga bagi seluruh Indonesia.

Kebun tersebut sering didatangi oleh petani dan beberapa pemegang kepentingan antara lain dari Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Banten. Yusniar mengatakan bahwa semua pemegang kepentingan yang pernah berkunjung ke kebun Edi terkejut melihat buah-buah besar yang bisa menghasilkan 60 sampai 70 biji per 100 gr. Dengan ukuran dan jumlah biji seperti itu, tidak heran kalau klon tersebut dijadikan klon unggul lokal dan diberi nama BLB 50. "Klon ini menjadi juara III pada perlombaan klon nasional tahun lalu," kata Yusniar.

Selain NMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat juga memiliki program yang mendorong petani untuk memiliki paling tidak tiga usaha tani, dan untuk komoditas perkebunan, Pemprov masuk melalui kakao. Program yang disebut Program Penyejahteraan Petani ini, adalah kerja sama antara Disbun dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan. "Sebelum Bakorluh turun ke lapangan, mereka akan diskusi terlebih dahulu dengan Disbun untuk menyusun rencana kerja dan materi yang akan diajarkan ke petani khusus untuk komoditas kakao," Fajarudin menjelaskan.

MEMASOK BARANG KE IBUKOTA

Seperti di provinsi-provinsi lain, peragian atau fermentasi belum banyak dilakukan oleh petani Sumbar. Menurut data Disbun, baru ada lima kelompok tani (poktan) yang melakukan rangkaian fermen-



Sekolah lapangan yang dilakukan Disbun.



Produk-produk UPH Chokato.

Berilah petani kesempatan dan biarkan mereka mengelola dirinya sendiri, sampai pada titik mereka harus berkembang lebih besar lagi, saat itulah mereka akan membutuhkan bantuan.



PENYEDIAAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN PROVINSI SUMBAR SAMPAI AKHIR 2013

- Kakao 825,000 batang
- Kelapa Sawit 122,500 batang
- Karet 382,000 batang
- Kopi 50,000 batang
- Kelapa 32,500 batang
- Pala 23,500 batang
- Cengkeh 16,600 batang

tasi, dan itu disebabkan karena petani tidak yakin siapa yang akan membeli biji hasil fermentasi, ditambah selisih harga yang tidak tinggi.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Disbun merangsang petani dengan menyediakan kotak-kotak fermentasi untuk semua poktan setiap tahunnya. Selain itu, sudah ada satu unit pengolahan hasil (UPH) di Payakumbuh bernama Chokato yang rutin membeli biji fermentasi dalam jumlah kecil. Saat ini Disbun masih memberikan kelonggaran bagi petani dalam menghasilkan jumlah biji fermentasi. "Tidak perlu sampai satu ton, tapi jumlahnya harus tetap dan diberikan tepat waktu," kata Fajarudin.

Fajarudin berpendapat bahwa fermentasi harus dilakukan oleh petani; demi menjaga mutu, UPH yang menjadi binaan Disbun menuntut petani untuk menjual biji fermentasi. Fajarudin ingin mencantoh UPH di Yogyakarta yang perlahan sudah dapat membeli biji fermentasi sampai satu ton. "Harapan saya, kotak-kotak fermentasi yang kami berikan dapat menggugah petani untuk menghasilkan biji fermentasi lebih banyak," kata Fajarudin yang melihat suatu perkembangan pesat dalam industri kakao di Sumbar.

Meski berkembang pesat, Kepala Dinas tidak lantas buru-buru membangun pabrik pengolahan besar. Sorotan Kepala Dinas saat ini masih industri kecil dengan

hasil barang setengah jadi. Menurutnya industri besar pada satu titik hanya akan memberikan nilai tambah kepada petani berupa biji. "Barang setengah jadi dari Sumbar seperti bubuk dan mentega harganya sudah tinggi kok, dan UPH kami di Pariaman dan Payakumbuh sudah memasok barang ke Jakarta, Bandung, dan Riau," kata Kepala Dinas.

LEBIH MANDIRI

Ketika ditanya mengenai pemberian kredit ke petani, Fajarudin mengakui belum ada pemberian kredit ke petani. Baru ada pemberian becak motor untuk membantu petani dalam memasarkan kakaonya. Alasan Disbun belum memberikan kredit karena mereka melihat, dengan NMK saja kelompok petani sudah berhasil melipatgandakan produksinya. Sementara itu petani pun merasa belum perlu dengan pemberian kredit, mereka mengatakan baru akan meminta kredit setelah pengelolaan berkelompok berjalan dengan baik dan anggota kelompoknya banyak. "Berilah petani kesempatan dan biarkan mereka mengelola dirinya sendiri, sampai pada titik mereka harus berkembang lebih besar lagi, saat itulah mereka akan membutuhkan bantuan," kata Fajarudin. ☉

Lebih jauh mengenai pendekatan Nagari Model Kakao (NMK) dapat Anda baca di alamat ini: <http://1drv.ms/1eUxnR>

LUAS DAN PRODUKSI KOMODITAS UTAMA PROVINSI SUMBAR SAMPAI AKHIR 2013

| TAHUN | KAKAO | | SAWIT | | KARET | | KOPI ARABIKA | | KOPI ROBUSTA | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | LUAS (HA) | PROD (TON) | LUAS (HA) | PROD (TON) | LUAS (HA) | PROD (TON) | LUAS (HA) | PROD (TON) | LUAS (HA) | PROD (TON) |
| 2009 | 84,254 | 40,250 | 344,351 | 833,485 | 166,719 | 133,816 | 23,185 | 21,294 | 24,707 | 16,658 |
| 2010 | 101,014 | 49,638 | 353,411 | 910,309 | 167,416 | 137,377 | 20,724 | 14,796 | 19,843 | 15,106 |
| 2011 | 117,014 | 59,836 | 356,140 | 922,746 | 170,250 | 139,687 | 20,742 | 14,857 | 19,843 | 15,203 |
| 2012 | 137,355 | 69,281 | 357,059 | 941,579 | 172,186 | 139,687 | 20,754 | 14,876 | 19,886 | 15,259 |
| 2013 | 148,343 | 74,171 | 364,220 | 955,153 | 176,975 | 159,277 | 21,169 | 16,939 | 19,934 | 16,227 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Barat.

Luas kebun kakao Padang Pariaman sampai akhir 2013 ‘hanya’ 18,000 ha, dan dari luas tersebut baru 7,671 ha yang menghasilkan biji kakao. Bagaimana cara mereka meningkatkan produktivitasnya dengan keadaan tersebut? Ikuti perbincangan Igor Rangga dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman berikut ini.

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEMUA DILAKUKAN DEMI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS



KSU Padang Manih Sakato di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.



Adam Chocolate produk KSU Padang Manih Sakato.

LUAS LAHAN YANG ‘SEMPIT’ justru membuat Kepala Dinas Yurisman Yakub, S.P., M.M. semakin terpacu dan berencana untuk menambah luas perkebunan kakaonya. Tidak dengan cara membuka lahan, tapi dengan tumpang sari di lahan kelapa yang sekarang ini luasnya sudah mencapai 40,000 ha. “Orang tidak akan banyak menemukan hamparan kakao di Pariaman,” kata Yurisman sambil tersenyum. Dua tahun lalu produktivitas kabupaten ini masih di bawah produktivitas nasional, yaitu 743 kg per hektar per tahun, sementara jumlah produksinya 5.669,5 ton.

Pertimbangan Dinas untuk menanam kakao di dalam kebun kelapa karena sebagian besar lahan di Pariaman sudah terisi dengan tanaman

Tumpang sari dengan kelapa juga *menguntungkan buat kelapa itu sendiri*, karena limbah kakao yang ditimbun di dalam rorak terbukti menyuburkan tanah.

pangan atau komoditas perkebunan lainnya. Saat ini Dinas belum dapat mengganti sawah atau kebun jagung dengan kakao.

Meski begitu, Dinas sudah menjalankan beberapa kegiatan untuk mendukung ‘perluasan’ lewat kebun kelapa tersebut. Dibantu Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyebarluaskan bibit ke kebun kelapa, mereka pun meremajakan pohon-pohon kakao tua atau yang produksinya sudah menurun dengan teknik sambung samping. “Untuk pelaksanaan sambung samping kami dibantu oleh Swisscontact,” kata Yurisman.

Lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dijalankan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat melalui sekolah lapangan, dan kursus pemberantasan hama PBK. Sementara demi meningkatkan kesejahteraan petani, Pemkab dibantu Pemprov membangun satu Nagari Model Kakao (NMK) di Padang Pariaman. “Tahun ini NMK Pariaman menduduki posisi nomor dua di Sumbar dalam tingkat keberhasilannya menyejahterakan masyarakat,” kata Yurisman.

Kepala Dinas mengatakan bahwa NMK Pariaman berhasil meningkatkan produksi melebihi rata-rata produksi Padang Pariaman bahkan Sumbar, yaitu mencapai 1,3 ton per hektar per tahun. Keberhasilan tersebut rupanya dibantu oleh perkebunan yang dipadukan dengan peternakan sapi, di mana kotorannya diolah menjadi pupuk organik. Yurisman sendiri berpendapat bahwa pupuk organik jauh lebih baik dibanding pupuk kimia. “Dengan pupuk organik, tidak hanya pohon kakaonya yang sehat, tapi juga tanahnya,” kata Yurisman.

KOMODITAS YANG MENJANJIKAN

Yurisman bercerita bahwa kakao dulunya dianggap sebagai komoditas sampingan oleh sebagian besar petani Pariaman, karena pekerjaan utama mereka adalah petani tanaman pangan. Namun sejalan dengan waktu, petani mulai melihat bahwa kakao adalah komoditas yang bisa diandalkan, meski belum bisa dijadikan komoditas utama. Dapat terlihat dari cara petani menggunakan dana hasil penjualan kakao. “Dana yang didapat acap kali digunakan untuk membiayai anak masuk sekolah atau membeli perlengkapan Lebaran,” kata Yurisman.

Tumpang sari dengan kelapa juga menguntungkan buat kelapa itu sendiri, karena limbah kakao yang ditimbun di dalam rorak terbukti menyuburkan tanah. Buah kelapa yang dihasilkan pun lebih banyak dan panen bisa lebih sering; yang biasanya panen tiga bulan sekali, sekarang bisa jadi sebulan sekali. “Bertanam kakao secara tidak langsung menguntungkan untuk komoditas lain,” kata Yurisman. Melihat hal tersebut, Pemkab langsung berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pada 2004, Kabupaten Padang Pariaman membuat suatu prakarsa untuk menghasilkan produktivitas kakao dalam jumlah besar, bahkan sebelum pencanangan Sumbar sebagai penghasil kakao terbesar Indonesia bagian barat. “Kami memulai dengan penanaman satu juta bibit ke lapangan,” kata Yurisman. Prakarsa itu semakin kuat setelah Bupati Padang Pariaman berkunjung ke Riau dan melihat usaha provinsi tersebut untuk menghasilkan kakao dalam jumlah besar. Bupati bahkan ikut pelatihan bercocok tanam kakao yang diadakan Pemprov Riau.

FERMENTASI MENYEJAHTERAKAN PETANI

Ketika ditanya mengenai kegiatan peragian atau fermentasi di Pariaman, Kepala Dinas menjawabnya dengan bersemangat. Untuk menggalakkan kegiatan fermentasi, Dinas memulai dengan memberikan kotak-kotak fermentasi.



Kepala Dinas Yurisman Yakub, S.P., M.M.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) ikut memberikan dukungan berupa hibah pabrik mini yang didirikan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Pabrik yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Padang Manih Sakato ini punya produk yang bernama Adam Chocolate. "Bisa didapatkan di Lapau Cokelat, satu kafe di pusat kota Pariaman," kata Yurisman berpromosi.

Setelah kotak fermentasi, Dinas memberikan beberapa kelompok tani para-para untuk menjemur kakao, disertai penyuluhan bahwa biji kakao yang layak masuk pabrik adalah biji yang telah diperlakukan dengan para-para. "Penyuluhan ini pun diberikan secara terus-menerus," kata Yurisman. Perlakuan ini pasti, dampak penyuluhan mulai terlihat, banyak petani yang telah melakukan fermentasi dan menjemur kakaonya dengan para-para.

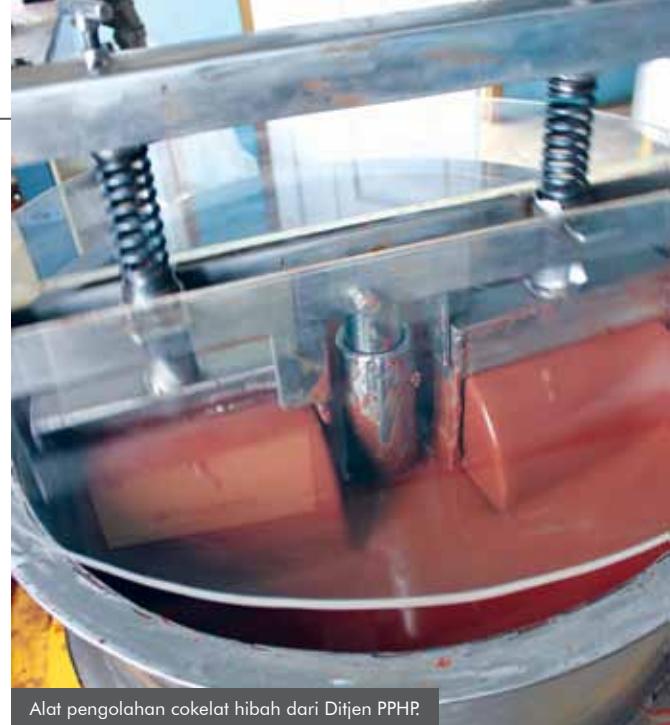
Di sini dapat terlihat bahwa fermentasi itu penting, karena pusat pengolahan baru dapat menghasilkan produk yang dapat dijual setelah mendapat biji fermentasi. Fermentasi secara tidak langsung menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan petani pun meningkat. "Ketika DPRD dan Pemerintah Daerah Lampung berkunjung ke pabrik mini tersebut, mereka terangsang untuk ikut menyejahterakan petani kakaonya, tentu dengan menggalakkan fermentasi," kata Yurisman.

SEMUA DEMI PRODUKTIVITAS

Demi mencapai produksi dan produktivitas kakao yang lebih tinggi lagi, Dinas menjalankan suatu program tahap lanjut di setiap nagari (desa), di mana setiap nagari diberikan satu penyuluhan yang setiap Rabu menjalankan safari penyuluhan dan pemangkasan dengan cara mengunjungi kelompok-kelompok tani. Selain memberi penyuluhan, penyuluhan tersebut akan mengumpulkan keterangan, kelompok mana yang membutuhkan alat pangkas atau alat-alat lain yang diperlukan. "Keterangan yang kami terima ditindaklanjuti dengan pemberian alat," kata Yurisman.

Tidak hanya pemangkasan, membasmi hama juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Hama yang cukup mengganggu di Padang Pariaman, selain PBK, adalah tupai yang senang memakan biji kakao. Untuk itu, bekerja sama dengan Komunitas Penembak Senapan Angin Indonesia (KOMPESENA), setiap tahun petani di sini melakukan festival berburu tupai, di mana satu tupai yang berhasil dibasmi akan dihargai Rp5.000. "Kegiatan ini terbukti sangat membantu petani kakao," kata Yurisman.

Pemberian kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disatukan dengan kelompok tani menjadi program Dinas lainnya untuk meningkatkan produksi. Kemudian ada dana bergulir yang dikelola dan dijalankan bersama Bank Nagari.



Alat pengolahan cokelat hibah dari Ditjen PPHP.

Yurisman mengakui bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan bukan perkara mudah. Karena itu perhatian Dinas untuk sementara ini ditujukan kepada 7,671 ha tadi agar tetap menghasilkan. Sementara kebun lainnya yang tersebar di 11 kecamatan akan digarap secara perlahan. Mengenai pemberian kredit untuk meningkatkan produktivitas juga belum sepenuhnya lancar, karena bersinggungan dengan adat istiadat Orang Minang. Kenapa?

Untuk memberikan kredit, bank akan meminta agunan. Karena tanah Orang Minang umumnya adalah tanah kaum (tanah milik rakyat), maka cukup sulit untuk dibuat sertifikatnya. Orang yang berhak atas tanah itu bukan cuma mereka yang tinggal di desa, tapi juga yang merantau. "Inilah yang membuat runtunan untuk memperoleh sertifikat bisa menjadi sangat panjang," kata Yurisman. Namun ia menyakinkan bahwa sekarang ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang mengembangkan suatu proyek yang diberi nama Proyek Nasional (ProNa), di mana syarat untuk mendapatkan sertifikat akan lebih mudah dan masyarakat tidak akan dipungut biaya sepeser pun.

Terakhir yang tak kalah penting adalah melibatkan siswa Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan mahasiswa fakultas pertanian dalam kegiatan perkebunan, sekaligus memperkenalkan kakao ke masyarakat bukan petani. Mahasiswa yang terjun ke lapangan adalah mereka yang ikut dalam Kelompok Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan sejauh ini mahasiswa dari Universitas Andalas, Padang dan Universitas Padjadjaran, Bandung telah rampung mengikuti KKN tersebut. "Kami berharap dengan semua kegiatan ini, Padang Pariaman dapat mewujudkan prakarsa 2004 dan menjadi penghasil kakao terbesar, paling tidak di Sumatra," kata Yurisman menutup pembicaraan. ☉

SIAPA PALING BANYAK MAKAN COKELAT*



*Data konsumsi cokelat per kapita diambil dari Leatherhead Food Research dengan pengecualian untuk India dan Cina, masing-masing angka diambil dari Mintel dan Rabobank.



Istana Basa Pagaruyuang, kebanggaan masyarakat Tanah Datar.

KABUPATEN TANAH DATAR

GENCAR MENINGKATKAN **KAPASITAS PETANI**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dalam lima tahun terakhir dituntut untuk meningkatkan budi daya tanaman kakao. Baca ulasan berikut untuk melihat cara-cara yang telah mereka terapkan.

MENURUT KEPALA DINAS Ir. Edi Arman, beberapa tahun belakangan semakin banyak permintaan masyarakat untuk melakukan budi daya tanaman kakao. Kepala Dinas tentu menyambut gembira permintaan tersebut, tapi apakah dengan menanam ribuan bibit sudah cukup? Edi berpikir, apa cara terbaik untuk menanggapi tuntutan tersebut. "Dalam beberapa tahun terakhir, Tanah Datar memang sedang mengembangkan kakao secara besar-besaran," kata Edi.

Edi mengatakan bahwa setelah 2006 Tanah Datar berhasil mengembangkan lebih dari 5,000 ha lahan. Ketika mulai dikembangkan, memang hanya ada 100 ha lahan kakao; tapi karena masyarakat melihat tanaman ini sebagai komoditas ekspor dan punya masa depan harga yang baik, minat mereka semakin tinggi.

Minat masyarakat dapat terlihat dari banyaknya proposal yang masuk ke Dinas, dan jika dihitung-hitung, masih ada 6,000 ha lahan lagi yang siap digarap. "Sekarang kami tengah mengusahakan apakah dana untuk pengembangan budi daya kakao bisa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau dibantu oleh Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II," kata Edi. Sekadar informasi, dari Gerakan Nasional Kakao (Gernas) sendiri Tanah Datar mendapat kurang lebih 1,000 ha.

SIAP TERJUN LANGSUNG

Keinginan masyarakat untuk menanam kakao memang besar, namun pengetahuan untuk memeliharanya rupanya masih kecil. Dinas pun meminta

dukungan dari Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumatra Barat untuk mengadakan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (PHT), pelatihan pemangkasan, termasuk pengolahan hasil. "Setelah semua dijalankan, perlahan petani Tanah Datar bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi budi daya perkebunan pada umumnya," kata Edi.

Sampai akhir 2013 telah dilatih kurang lebih 500 petani, dan harapannya pada 2014 Disbun bisa mendapat dukungan dari APBD Tingkat II sehingga bisa melatih 300 petani lagi. "Masih banyak petani yang harus dilatih, karena pengetahuan mereka masih sebatas melakukan penanaman, sementara untuk pemeliharaan, banyak yang belum paham," kata Edi.

Dalam meningkatkan budi daya kakao, Dinas memiliki cara lain, yaitu melalui gerakan yang dinamakan Gerakan Pemeliharaan Kebun dan Pengendalian Hama Khusus Kakao. Ada kelompok kerja yang sudah dibentuk untuk menjalankan gerakan ini, di mana fungsinya menjawab pertanyaan masyarakat; bagaimana cara memerangi hama penyakit, cara pengolahan hasil, dan cara melakukan pemupukan. Melalui kelompok ini Dinas siap terjun langsung, bahkan siap menerima panggilan petani baik melalui surat atau telepon.

BERDAMPAK TERHADAP PRODUKSI

Cara berikutnya yang dilakukan Dinas adalah memberikan penyuluhan kepada petani melalui pola kunjungan. Petani dikunjungi dan dilatih melakukan berbagai praktik, dimulai dengan 10 batang kakao. Setelah petani dirasa paham, mereka akan dibiarkan jalan sendiri, supaya mereka bisa cepat belajar dan mengenali kendala apa saja yang terjadi di lapangan.



Kepala Dinas Ir. Edi Arman.

Bericara mengenai pelatihan, Edi senang bisa bekerja sama dengan salah satu anggota CSP, yaitu Swisscontact. Kerja sama tersebut terbukti manjur, terutama untuk memerangi hama PBK dan busuk buah. "Syukurlah dengan banyaknya pola sekolah lapangan dan penyuluhan, keinginan petani untuk merawat kebunnya semakin meningkat," kata Edi.

Edi melihat, walaupun terjadi krisis ekonomi di mana-mana, harga kakao tetap mantap, tidak seperti karet yang devaluasinya sangat besar. Bahkan pada awal 2014 harga kakao mencapai Rp30,000 per kilogram. Karena itu Edi yakin, sektor kakao bisa betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat Tanah Datar. Apalagi setelah dibantu oleh Disbun Provinsi, termasuk pusat, Dinas bisa menjalankan program setiap tahun. Pada 2013 lalu Dinas juga diberi 75,000 bibit kakao oleh Disbun Provinsi.

Dengan sekolah lapangan, Edi melihat ada peningkatan mutu pemeliharaan yang berdampak positif terhadap produksi. Buktiya petani kakao Tanah Datar sekarang tidak lagi hanya mendapat Rp300,000 sekali panen, tapi bisa mendapat Rp700,000. Bahkan ada beberapa petani yang biasanya hanya mendapat Rp600,000, sekarang bisa mendapat di atas Rp1,000,000.

FOKUS PADA PENINGKATAN KAPASITAS

Ketika ditanya mengenai peragian atau fermentasi, Kepala Dinas mengatakan bahwa selama perbedaan harga biji fermentasi dengan nonfermentasi tidak banyak, ia tidak akan mengharuskan petani untuk melakukan fermentasi. "Keputusan saya serahkan kepada mereka," kata Edi.

Menurut Edi, untuk menghasilkan biji fermentasi petani membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga kerja yang bertambah. Jika harga yang ditawarkan tidak banyak, tentu secara ekonomi petani akan merasa rugi. "Mutu memang lebih baik, tapi jika dihargai hanya lebih tinggi Rp2,000, saya pun akan berpikir dua kali," kata Kepala Dinas. Mengenai hal ini, Edi sudah menyampaikannya ke Forum Kakao Tanah Datar beberapa waktu lalu, di mana beberapa pemegang kepentingan dari Jakarta ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Berhubungan dengan proses fermentasi, Kepala Dinas pernah ditawari untuk membangun pabrik pengolahan kakao, namun karena belum banyak petani yang melakukan proses tersebut, maka tawaran ini ditolak oleh Kepala Dinas. Edi mengaku sudah berencana membangun pabrik pengolahan, tapi jika sudah ada 50% petani yang melakukan fermentasi. "Sekarang ini kami fokus pada peningkatan kapasitas dulu, jika semua sudah baik, maka kami akan berpikir untuk membangun pabrik," kata Edi menutup pembicaraan. ©



SULAWESI BARAT

Gubernur H. Anwar Adnan Shaleh,
pencetus Gerakan Pembaruan Kakao (GPK) Sulbar.

MENEMUKAN KEMBALI KEJAYAAN YANG HILANG

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penghasilan masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) pernah hanya bersumber dari kakao. Ketika itu kemampuan pasar dan harga kakao Sulbar sangat menjanjikan sehingga memicu euforia di masyarakat.

Mereka berbondong-bondong menanam kakao sehingga luas lahannya melebar sampai 200,000 ha.

NAMUN KEMAMPUAN SULBAR untuk menghasilkan kakao sempat menu run karena banyaknya tanaman tua, sistem pengelolaan produksi yang lemah, sampai kurangnya pemeliharaan. Itu semua memunculkan berbagai masalah yang tentunya berimbang pada produktivitas. Keadaan semakin diperburuk dengan hama penyakit yang merajalela, ditambah pemikiran masyarakat yang terlalu percaya dengan pestisida. Semua itu menimbulkan kegalauan di masyarakat, beberapa petani meninggalkan kakao dan beralih ke komoditas lain.

Meski begitu, luas lahan kakao Sulbar sejauh ini masih 172,000 ha lebih. Itulah yang kemudian memicu semangat Gubernur H. Anwar Adnan Shaleh untuk mengembalikan kejayaan kakao Sulbar, caranya dengan mencanangkan Gerakan Pembaruan Kakao (GPK), yang kemudian disusul dengan mendukung Gerakan Nasional (Gernas) Kakao yang merupakan prakarsa pemerintah pusat. “Gairah untuk menanam kakao muncul kembali setelah itu,” kata Ir. Supriyatno, M.M., Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat yang ditemui di ruang kerjanya akhir Februari lalu.

MENELAAH PERSOALAN MENDASAR

Supriyatno mengatakan bahwa hanya sebagian kecil wilayah di dunia yang cocok ditanami kakao, salah satunya tentu Sulbar. Provinsi ini pun memiliki kelebihan yaitu masyarakat yang telah mengenal kakao sejak lama. Meski begitu, hal ini tidak menjamin ada perbaikan dalam pengelolaan kebun, bahkan kesuburan tanah. "Kami pun tidak memiliki lembaga petani yang kuat," kata Supriyatno.

Pemerintah daerah (pemda) Sulbar kemudian membaca gejala yang terjadi di masyarakat, yaitu:

- ✿ Produktivitas yang rendah
- ✿ Mutu biji yang rendah
- ✿ Sistem pasar yang kurang baik
- ✿ Budi daya yang buruk, dan
- ✿ Hama penyakit.

Gejala itu langsung ditanggapi oleh Gubernur dengan melancarkan tiga kegiatan awal, yaitu:

- ✿ Pemberian pupuk
- ✿ Pemberian feromon untuk mengendalikan lalat buah, serta
- ✿ Pemberian gunting untuk pemangkasan.

Tidak hanya itu, demi meningkatkan kesejahteraan petani, produktivitas, dan mutu biji, Supriyatno membagi wilayah Sulbar menjadi beberapa gugus yang nantinya menjadi pusat pengembangan dan pengelolaan kakao. Pengelolaan secara kawasan diharapkan dapat memecahkan persoalan di dalam kebun maupun pasar.

MERANGKUL PETANI MUDA

Demi mengasah kemampuan petani, Disbun menggiatkan kegiatan *training of trainers* (TOT), terutama bagi petani muda yang memiliki kemampuan dalam bidang kakao, dan sekiranya mungkin, lulusan sekolah pertanian menengah atas (SPMA). Alasan Supriyatno menggiatkan TOT karena selalu timbul masalah setiap kali petani diberikan kredit. Hasil nyata dari pemberian kredit sangat rendah, dan pengembaliannya pun lama.

Petani-petani muda tersebut kemudian disebar di dua kecamatan yang sekarang menjadi gugus percontohan. "Mereka juga harus berasal dari wilayah tersebut, bukan orang luar," kata Supriyatno. Dalam pelaksanaan TOT, Supriyatno mengundang pelaksana pelaksana dari perbankan (Bank Indonesia), pendidikan, dan pemerintah.

Petani yang telah mengikuti TOT akan memulai pekerjaannya dengan menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan gugus dalam membangun kerja sama dengan bank (BNI diminta Disbun untuk mendukung ke-



1

1. Seorang petani memeriksa biji kakao yang sedang dijemur.



2

2. Pelatihan pemasaran dan baku mutu untuk petani di Kecamatan Tapalang Barat.

Sekarang ini sekitar *3,600 ha lahan membutuhkan dana pupuk sebesar Rp11 miliar* untuk satu tahun. Dari jumlah itu diharapkan produktivitas naik menjadi 1,5 ton dari sebelumnya hanya 800 kg.



Gudang peragian Sinar Andau, Polewali Mandar. Salah satu bentuk usaha keras Sulbar dalam menggalakkan fermentasi.



giatan ini). Kemudian mereka akan menelaah berapa luas lahan dan berapa tegakan yang masih bisa menghasilkan atau yang harus diremajakan. "Mereka juga akan memeriksa apakah lahan tersebut punya sertifikat atau tidak," Supriyatno menambahkan.

Setelah itu mereka akan membentuk gugus yang lebih kecil, seperti kampung, di mana anggotanya akan membuat suatu rencana kerja. Rencana kerja tersebut bertujuan untuk merubah kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan pestisida, menjadi kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari pemangkasannya yang ideal, membenamkan semua buah busuk, membuat sanitasi, dan menggunakan pupuk kompos. Pembelian pupuk yang dana-nya akan disediakan oleh bank ini, harus memenuhi enam syarat, yaitu:

- ✿ Tepat waktu
- ✿ Tepat jenis
- ✿ Tepat jumlah
- ✿ Tepat mutu

- ✿ Tepat harga, dan
- ✿ Tepat lokasi.

Sekarang ini sekitar 3,600 ha lahan membutuhkan dana pupuk sebesar Rp11 miliar untuk satu tahun. Dari jumlah itu diharapkan produktivitas naik menjadi 1,5 ton dari sebelumnya hanya 800 kg. Supriyatno mengatakan bahwa semua kegiatan tadi harus dilaksanakan secara kawasan agar cara-cara yang merugikan bisa dihentikan dengan cepat.

Para petani terlatih juga harus mengetahui waktu panen masing-masing gugus, agar mereka dapat mengawasi kegiatan pascapanen. Semua hasil panen harus melalui peragian atau fermentasi selama lima hari, sehingga tidak ada lagi petani yang menjual biji basah. "Saya ingin menciptakan suatu kesamaan pasar dan mutu," kata Supriyatno.

MENGUNTUNGKAN DALAM BANYAK HAL

Supriyatno mengatakan bahwa mutu premium tidak akan

Saat ini sebanyak 59% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar berasal dari perkebunan, sehingga membuat penyerapan tenaga kerja dari sektor ini mencapai 50%.

berarti apa-apa jika tidak berdasarkan skala ekonomi, maksudnya meski biji sudah bermutu premium namun jika jumlahnya hanya satu atau dua kuintal, tidak akan menarik bagi pembeli. Jadi dari luas 3,600 ha tadi, diharapkan dalam satu minggu dapat dihasilkan 30 sampai 50 ton biji bermutu premium.

Untuk meremajakan tanaman tua, Disbun telah membentuk 30 kelompok yang tugasnya khusus melaksanakan sambung pucuk. Kelompok-kelompok ini diberikan sarana oleh Disbun sehingga mereka dapat bekerja sendiri. Sembari menunggu pucuk-pucuk itu tumbuh, masyarakat diberikan tanaman sela seperti jagung; tujuh sampai delapan bulan kemudian jagung sudah dapat dipanen. "Jadi pendapatan akan terus ada bagi petani," kata Supriyatno.

Saat ini sebanyak 59% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar berasal dari perkebunan, sehingga



Ir. Supriyatno, M.M., Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat.

membuat penyerapan tenaga kerja dari sektor ini mencapai 50%. Dengan harga kakao yang semakin menggairahkan, semakin banyak pula anak-anak muda yang mencoba mengusahakan kakao. Meski cara ini tidak dianjurkan, mereka sering terlihat sedang menjemur biji di pinggir-pinggir jalan. "Ini menjadi bukti bahwa ada pergerakan baru dalam industri kakao Sulbar," kata Supriyatno.

SIAP MENGHADAPI PASAR BEBAS

Intinya dalam meningkatkan produktivitas, mutu, dan terhindar dari penyakit, Sulbar harus memperbaiki pelayanan sarana produksi dan mengelola kebun secara kawasan. Karena dengan begitu akan meningkatkan pula daya tawar masyarakat terhadap pasar, dan berakhir pada meningkatnya kesejahteraan mereka.

Supriyatno mengajak masyarakat Sulbar untuk mengelola perkebunan secara profesional, melihat kebun sebagai lahan usaha; masyarakat harus punya perhitungan yang jelas, paham akan pengelolaan pasar, dan punya sistem kerja yang teratur. Apalagi pada akhir 2015 nanti, masyarakat ekonomi ASEAN akan memberlakukan sistem pasar bebas, yang artinya kita harus menghasilkan produk yang unggul agar mampu bersaing di pasar tersebut. "Lewat kegiatan usaha yang nyata, produktivitas dan mutu tinggi pasti tercapai, dan secara langsung mengembalikan kejayaan kakao Sulbar ke tempatnya semula," kata Supriyatno menutup pembicaraan. ©



Bubuk cokelat Tipalayo, produk asli Polewali Mandar.



Dr. Ir. A. Ardin Tjatjo, M.P., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

SULAWESI SELATAN

MENGAWAL INDUSTRI KAKAO INDONESIA

Sebelum terpisah dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki produksi kakao tertinggi di Indonesia yaitu lebih dari 70%. Meski sekarang luasnya berkurang, Sulsel rupanya masih bisa menyumbang 40% kakao untuk Indonesia. Berikut perbincangan dengan Dr. Ir. A. Ardin Tjatjo, M.P., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Selatan, menyangkut perkembangan terkini sektor kakao Sulsel.

KEMAMPUAN SULSEL untuk tetap bisa menyumbang produksi terbanyak karena masyarakatnya sendiri yang menunjang, mereka ter dorong untuk terus menanam kakao meski sudah berjalan hampir 40 tahun. Dibanding provinsi lain, kakao menyebar dengan cepat di Sulsel karena iklimnya mendukung. Selain itu Sulsel juga menyediakan banyak lahan basah yang cocok ditanami kakao. "Lahan basah banyak terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Wajo," kata Ardin.

Ketika pertama kali ditanam pada dekade 1970-an, kakao memang hanya ditanam di lahan-lahan basah ini. Tapi sejalan dengan waktu, ditambah dengan

harga kakao yang menjanjikan, tanaman itu pun menyebar ke seluruh kabupaten. Sampai saat ini Luwu masih menjadi penghasil kakao terbesar di Sulsel. "Luas lahannya mencapai 46,000 ha dengan produksi sebesar 32,000 ton," kata Ardin.

Menurut Ardin, sekarang ini kakao sudah dianggap sebagai komoditas sosial di Sulsel, artinya sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hal tersebut membuat sebagian petani tidak lagi menjadikannya sebagai sumber utama penghasilan. Beberapa petani mulai menjalani usaha lain, seperti durian dan sawah, sehingga keuntungan mereka tidak sepenuhnya datang dari kakao.

"Luas pemilikan rata-rata lahan kakao di Sulsel adalah 0,8 ha," kata Ardin.

KEGIATAN DI LUAR KEBUN

Meski ada kecenderungan seperti itu, Sulsel justru menjadikan kakao sebagai alat utama dalam mendukung Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3I). Kegiatan di luar kebun (*off-farm*) diperbanyak, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada petani modal untuk membangun pabrik di Sulsel. "Pabrik terbaru yang diresmikan di Makassar adalah pabrik pengolahan kakao, Barry Callebaut," kata Ardin. Pabrik-pabrik seperti ini tidak hanya meningkatkan investasi, tapi

juga meningkatkan ekonomi masyarakat karena mereka terlibat di dalamnya

Pemerintah provinsi sendiri berharap dengan MP3I, Sulsel bisa memiliki pabrik yang menghasilkan produk jadi. Diperkirakan, tingkat konsumsi cokelat di Indonesia akan meningkat di masa depan. Secara statistik tingkat konsumsi cokelat Indonesia saat ini masih 0,02 kg per tahun per kapita, jauh di bawah tingkat konsumsi negara lain, paling tidak India, sesama negara Asia.

Tindakan lain yang ditempuh Sulsel dalam MP3I tidak lain adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia, baik petugas maupun petani; dalam hal ini petugas sebagai sasaran internal, sementara petani sebagai sasaran eksternal. Tidak lupa memperbaiki sarana dan prasarana bagi petani demi meningkatkan produksi dan produktivitas.

SARANA PENDORONG TERBESAR

Selain melalui MP3I semua tindakan tersebut digabung dalam sebuah peta jalan yang diharapkan dapat meningkatkan produksi Sulsel pada 2015 menjadi 300,000 ton. "Produksi Sulsel sampai awal 2014 masih 175,000 ton, itu saja sudah melibatkan kurang lebih 290,000 KK," kata Ardin. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka saat ini lebih dari satu juta orang di Sulsel menggantungkan hidupnya dari kakao.

Ardin menambahkan bahwa dengan meningkatkan kemampuan gabungan kelompok tani (gapoktan), petani diharapkan mampu mencapai pasar. Di sinilah peranan Disbun untuk menjadi perantara, dalam hal ini dengan bank maupun industri. Disbun akan mendampingi gapoktan sampai mereka mencapai pasar, karena kunci keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, adalah ketika petani mampu melihat pasar. Ketika petani dapat melihat pasar dengan baik, maka mereka akan



Acara pelepasan biji kakao Barry Callebaut ke Malaysia oleh Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

mengelakukan kegiatan *off-farm* dengan sungguh-sungguh. "Pasar merupakan sarana pendorong terbesar," kata Ardin.

Selama ini sudah banyak cara yang dilakukan untuk mendekatkan petani dengan pasar. Puluhan perusahaan telah bermitra dengan petani, tetapi sedikit yang berkesinambungan. "Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan pasar," kata Ardin. Jika semua pihak mengetahui harga, maka akan ada perbaikan.

TAK ADA JALAN LAIN

Di Sulsel hampir semua petani maju sudah membuka pembibitan yang hasilnya mereka jual, baik kepada petani di Sulsel, maupun di provinsi lain. Semua bibit yang dihasilkan harus mendapat sertifikat dari Balai Proteksi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BP2MBP) untuk menjamin bahwa mutu bibit yang dihasilkan sudah baik. "Tugas balai ini juga memastikan bahwa bibit yang beredar di Sulsel adalah bibit yang telah mendapat sertifikat," kata Ardin.

Ardin mengingatkan bahwa sertifikat yang diberikan BP2MBP tidak serta

merta memberi izin petani untuk menjual hasil klon secara bebas. Kemampuan klon akan dilihat terlebih dahulu, apakah cocok ditanam di luar daerah atau tidak. Jika tidak, sertifikat justru akan membatasi penjualan hanya pada daerah tertentu. BP2MBP merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah pengawasan Disbun.

Saat ini ada beberapa klon yang disarankan oleh Disbun, selain Sulawesi 1 dan 2. Klon seperti M01, M02, dan B28, adalah klon-klon hasil pengembangan petani yang menurut Ardin sudah sesuai dengan kearifan lokal. "Biasanya petani akan melakukan persilangan sendiri ketika mereka melihat ada satu rumpun yang produksinya besar," kata Ardin.

Bercerita mengenai klon, membawa kami pada anomali cuaca. Ardin mengatakan bahwa anomali cuaca sekarang ini cukup membuat produksi tidak menentu, sekaligus merangsang pertumbuhan organisme pengganggu tanaman. Menanggapi hal tersebut, Ardin telah mengimbau sekelompok peneliti Disbun untuk menghasilkan klon yang tang-

guh menghadapi perubahan iklim. "Sementara ini Disbun akan terus mendorong petani untuk melakukan pemangkasan, agar tanaman sedapat mungkin menerima sinar matahari," kata Ardin. Selain itu, pemupukan dengan kompos harus terus dijalankan, karena tanaman yang bergizi tinggi akan lebih tahan terhadap penyakit.

Menutup pembicaraan, Ardin kembali mengingatkan bahwa tidak ada jalan lain untuk memajukan industri kakao Sulsel selain dengan meningkatkan produksi dan produktivitas; selanjutnya didukung dengan perbaikan mutu dan terus mendekatkan petani ke pasar. Ardin juga berharap semakin banyak lulusan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Kakao yang bergabung dengan Disbun demi 'mengawal' perjalanan Sulsel memajukan industri ini. "Lulusan SMK kelak akan menjadi tenaga-tenaga profesional yang punya kemampuan besar untuk memajukan industri kakao, tidak hanya untuk Sulsel, tapi juga untuk Indonesia," kata Ardin. ©

LUAS, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI PERKEBUNAN RAKYAT PER KOMODITAS PER KABUPATEN, PROVINSI SULAWESI SELATAN (SAMPAI NOVEMBER 2013)

| No. | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) | | | | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|-----|----------------|-----------|---------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | | TBM | TM | TT/R | Jumlah | | | |
| 1. | Luwu | 4,122 | 28,733 | 3,757 | 36,612 | 26,899 | 936 | 31,592 |
| 2. | Luwu Utara | 4,518 | 18,665 | 19,252 | 42,435 | 14,289 | 766 | 17,899 |
| 3. | Luwu Timur | 4,255 | 21,876 | 7,075 | 33,206 | 16,220 | 741 | 23,246 |
| 4. | Palopo | 180 | 2,987 | 196 | 3,370 | 2,815 | 942 | 2,321 |
| 5. | Tana Toraja | 844 | 2,545 | 749 | 4,138 | 881 | 346 | 13,972 |
| 6. | Toraja Utara | 665 | 1,649 | 244 | 2,558 | 1,442 | 874 | 7,554 |
| 7. | Bone | 1,306 | 25,457 | 3,942 | 30,705 | 15,664 | 615 | 40,661 |
| 8. | Soppeng | 2,429 | 14,065 | 1,364 | 17,858 | 13,564 | 964 | 23,438 |
| 9. | Wajo | 771 | 14,331 | 615 | 15,717 | 10,140 | 708 | 24,371 |
| 10. | Sinjai | 1,131 | 6,336 | 3,020 | 10,487 | 1,647 | 260 | 24,396 |
| 11. | Bulukumba | 1,875 | 5,763 | 34 | 7,672 | 5,188 | 900 | 11,374 |
| 12. | Selayar | 204 | 385 | 84 | 673 | 150 | 390 | 1,424 |
| 13. | Bantaeng | 733 | 4,644 | - | 5,377 | 2,090 | 450 | 6,432 |
| 14. | Jeneponto | 3 | 81 | 19 | 103 | 10 | 123 | 281 |
| 15. | Takalar | 5 | 39 | 1 | 45 | 24 | 615 | 201 |
| 16. | Gowa | 1,986 | 2,905 | 2,215 | 7,006 | 1,665 | 573 | 11,497 |
| 17. | Maros | 406 | 1,221 | 30 | 1,657 | 671 | 550 | 2,150 |
| 18. | Pangkep | 105 | 140 | 23 | 268 | 49 | 350 | 698 |
| 19. | Barru | 70 | 862 | 16 | 948 | 801 | 929 | 1,650 |
| 20. | Pinrang | 1,745 | 15,504 | 4,408 | 21,657 | 14,108 | 910 | 23,172 |
| 21. | Sidrap | 25 | 8,060 | 118 | 8,203 | 11,017 | 1,367 | 7,801 |
| 22. | Enrekang | 2,464 | 7,190 | 247 | 9,901 | 6,829 | 950 | 11,688 |
| | Jumlah | 29,842 | 183,438 | 47,409 | 260,596 | 146,163 | 797 | 287,818 |

TBM: Tanaman belum menghasilkan

TM: Tanaman menghasilkan

TT/R: Tanaman tua/rusak

Pertemuan Pemegang Kepentingan Kakao Luwu Utara

MEMBANGUN KERJA SAMA ANTARA PEMEGANG KEPENTINGAN

Akhir Desember lalu, para pemerintah kabupaten di wilayah Luwu Raya, mengadakan diskusi yang diikuti oleh seluruh pemegang kepentingan di Luwu Raya. Diskusi ini didukung oleh Swisscontact dan Mars Incorporated.

DIAWALI OLEH H. BAHARUDDIN ISKANDAR, Pimpinan Kelompok Usaha Kabupaten Luwu Utara (Lutra) ini melontarkan beberapa pembahasan seputar kakao di kabupaten tersebut. H. Baharuddin mengatakan bahwa laju produksi kakao sebenarnya agak menurun, dibandingkan industri kakao yang justru meningkat. Beberapa petani pun masih dikendalikan oleh pasar, padahal idealnya, petanilah yang harus mengendalikan pasar.

Sementara itu Ir. H. Sam Sumastono, M.M. (Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lutra) mengatakan bahwa peluang untuk mengembangkan usaha kakao masih sangat luas, sehingga jalur menuju modal, teknologi, dan pasar harus diperlebar. Menurut H. Sam, luas lahan kakao Lutra seluruhnya mencapai 64,000 hektar. Lahan yang telah diterapkan sambung samping mencapai 20,000 hektar, sambung pucuk 12,000 hektar. "Jadi masih ada 32,000 hektar lagi yang belum tersentuh," kata H. Sam.

MENYELAMATKAN 250 HEKTAR

Kepala Bappeda Lutra, Ir. Bambang Irawan, M. Si dalam diskusi ini menyampaikan bahwa 2014 merupakan tahun yang disiapkan untuk industri. Meski begitu, ketersediaan dana masih terbatas sementara kebutuhan anggaran justru sangat besar. Menurutnya, provinsi lebih baik mendahulukan industri, sementara program pendidikan dan kesehatan gratis ditinjau ulang.



Petani pun menyampaikan beberapa hal dalam diskusi ini. Abdul Hamid, petani dari Luwu Timur mengatakan bahwa sekitar 250 hektar lahan kakao berhasil diselamatkan dari penebangan dan pengalihan lahan berkat sekolah lapangan yang didukung MARS sejak 2012. Mengenai mutu kloning, Abdul mengatakan bahwa ada beberapa kloning yang diragukan mutunya karena tidak ada label.

MEMBANGUN SALURAN AIR

Dalam kesempatan ini Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan kecenderungan petani untuk berhenti menanam kakao semakin tinggi, umumnya disebabkan oleh banjir. Untuk mencegahnya Disbun berencana membuat alokasi dana berkesinambungan agar saluran-saluran air dapat dibangun di sekitar lahan kakao.

Awal 2014 Disbun berencana untuk mendorong petani meningkatkan produktivitas sampai 2,000 kg per hektar. Pelatihan untuk sumber daya manusia pun terus dilakukan.

Lewat diskusi ini beberapa pengusaha lokal yang hadir ikut menyakinkan bahwa biji kakao Sulawesi Selatan punya keunikan sendiri dibanding biji kakao dari daerah lain, yaitu titik lelehnya yang tinggi. Meski tidak dapat dimungkiri bahwa ukuran biji Sulawesi Selatan masih lebih kecil dan kandungan sampohnya masih tinggi. Para pengusaha juga berencana untuk membentuk asosiasi industri pengolahan kakao di setiap kecamatan. ©

PROVINSI PAPUA
DAN PAPUA BARAT

BERPOTENSI MENJADI PENGHASIL KAKAO TERBESAR

Melihat luas lahannya, kedua provinsi ini memiliki daya yang luar biasa untuk menghasilkan kakao. Meski begitu, pendampingan kepada petani masih harus sering dilakukan karena mutu biji kakao Papua masih rendah.

MENURUT MARIA RUMADAS, Kepala Subbagian Monitoring Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua yang dihubungi lewat telepon beberapa waktu lalu, petani kakao di provinsi ini belum banyak peduli dengan mutu biji kakao yang mereka hasilkan, terlihat dari kandungan air dan sampohnya yang masih tinggi. Hal tersebut tentu berimbas pada harga yang didapat petani. "Di beberapa tempat harga menjadi sangat rendah," kata Maria. Tidak hanya itu, harga yang rendah justru semakin menyurutkan minat petani memperbaiki mutu biji kakaonya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bappeda Papua membantu pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini dinas perkebunan untuk menghimpun masyarakat dan menyusun rencana yang diperlukan dalam meningkatkan dorongan memperbaiki mutu biji kakao. Selain itu Bappeda bertugas mengawasi setiap kegiatan pendampingan di kebun agar setiap petani bisa mendapatkan ilmu yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat.



POTENSI BESAR

Menurut data dari Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), kedua provinsi ini memiliki kemampuan kakao yang sangat besar, sekitar 1,3 juta ha. Saat ini baru sekitar 17,000 ha yang sudah ditanami kakao. Untuk Provinsi Papua, tanaman ini menyebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi. Sementara untuk Provinsi Papua Barat, kakao menyebar di Kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat dan Raja Ampat.

Belakangan ini pemda kedua provinsi lewat UP4B mulai menggalakkan kegiatan perencanaan usaha untuk mengembangkan komoditas kakao. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuat suatu rencana usaha dan anjuran bagi pengembangan komoditas kakao Papua, selain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Maria mengatakan, Kabupaten Jayapura sendiri sudah menetapkan kebijakan bahwa setiap kepala keluarga (KK) petani kakao di masa depan wajib memiliki lahan paling tidak

satu hektar agar bisa menghasilkan pendapatan Rp5 juta setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa kakao sudah dijadikan komoditas perkebunan utama di Papua. "Tapi tidak menutup kemungkinan petani untuk memiliki kebun sampingan dan memenuhi lima juta itu," kata Maria. Dipilihnya kakao sebagai komoditas utama karena tanaman ini jika dirawat dengan baik dapat dipanen setiap minggu.

Sementara itu ada beberapa kendala yang sedang dicari jalan keluarnya saat ini, yaitu:

- Budi daya kakao yang masih tradisional, petani membiarkan tanaman tumbuh sendiri serta tak memelihara kebun
- Terbatasnya benih dan entres menghambat penyaluran bahan tanam kakao ke daerah pusat pengembangan
- Serangan *vascular streak dieback* (VSD) dan penyakit busuk buah yang diakibatkan oleh penggerek buah kakao (PBK) cukup berat, sehingga menyebabkan kakao gagal berbuah atau sama sekali tidak menghasilkan
- Penurunan produksi akibat serangan VSD dan PBK menyebabkan pemasaran mengarah pada pembeli tunggal (monopsoni), karena pemasar lain berhenti beroperasi.

Menurut Maria selama ini petani kakao Papua menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul yang datang ke desa.

Selanjutnya kakao diekspor melalui Makassar, Sulawesi Selatan atau Surabaya, Jawa Timur.

Melihat hal tersebut UP4B menganjurkan empat program awal untuk Papua, yaitu:

- ① Memperluas wilayah budi daya kakao
- ② Menggiatkan kembali cara bertanam kakao yang baik agar hasil bisa meningkat
- ③ Pengembangan benih dan entres unggul
- ④ Mengembangkan kemampuan budi daya petani kakao dengan pelatihan yang berkelanjutan.

HARAPAN BESAR

Maria berharap bahwa lebih banyak lagi perusahaan besar yang menanamkan investasi di Papua. Menurutnya perusahaan-perusahaan ini pasti mampu membeli biji kakao bermutu dalam jumlah besar, sehingga secara tidak langsung merangsang petani untuk menghasilkan biji bermutu lebih banyak lagi. Selain itu, penduduk asli Papua yang mewarisi lahan-lahan pertanian luas, memiliki daya luar biasa untuk menghasilkan kakao. "Kami berharap dengan daya seperti itu, kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat dan menjadikan Papua sebagai penghasil kakao terbaru sekaligus terbesar di Indonesia," kata Maria. ☺

CONTOH KAPASITAS PRODUKSI DI LIMA KABUPATEN

KABUPATEN JAYAPURA

Tersedia 386,700 ha lahan yang cocok untuk budi daya kakao. Lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 6,342 ha dengan hasil rata-rata 5,140 ton/tahun

KABUPATEN SARMI

Tersedia 392,675 ha lahan yang cocok untuk budi daya kakao. Lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 1,970 ha dengan hasil rata-rata 686 ton/tahun

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Tersedia 19,100 ha lahan yang cocok untuk budi daya kakao. Lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 1,926 ha dengan hasil rata-rata 1,447 ton/tahun

KABUPATEN WAROPEN

Tersedia 196,011 ha lahan yang cocok untuk budi daya kakao. Lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 997 ha dengan hasil rata-rata 747 ton/tahun

KABUPATEN NABIRE

Tersedia 131,460 ha lahan yang cocok untuk budi daya kakao. Lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 1,828 ha dengan hasil rata-rata 1,369 ton/tahun

DINAS KOPERASI DAN UMKM
SULAWESI SELATAN

MEMPERMUDAH PETANI MEMBUKA USAHA



Kepala Seksi Permodalan dan
Jasa Keuangan, Muh. Hasyim.

Akhir Februari lalu CSP kedatangan tamu dari Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Muh. Hasyim (Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan) yang datang untuk memberikan penjabaran mengenai undang-undang perkoperasian terbaru.

DALAM KURUN 20 TAHUN TERAKHIR sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 25/1992 tentang perkoperasian, tidak banyak yang berubah dalam dunia koperasi Indonesia. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa UU itu tidak mampu berperan sebagai alat untuk membangun koperasi. Penyebab utamanya adalah, ketentuan-ketentuan di dalam UU tersebut lemah, serta kurangnya kerja sama horizontal dengan UU lain yang mengatur perekonomian.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka UU No. 17/2012 mulai diberlakukan sebagai pengganti UU sebelumnya; ia memperbarui hukum koperasi Indonesia, sehingga diharapkan mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta dapat dipercaya sebagai badan usaha.

UU baru ini pun mempertegas peranan pemerintah sebagai pemberi kebijakan, sekaligus tenaga pendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri dan kemandirian koperasi dengan cara tidak ikut campur dalam urusan internal koperasi. “Pelaksanaan UU secara tepat akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya,” kata Hasyim.

SYARAT YANG MUDAH

Ada beberapa hal yang berubah dalam UU yang terdiri dari 17 bab dan 126 pasal ini. Yang menonjol adalah dipadatkannya jenis koperasi menjadi empat jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi produsen
2. Koperasi konsumen
3. Koperasi jasa, dan
4. Koperasi simpan pinjam.

Keempat koperasi tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: koperasi produsen adalah koperasi di mana sebagian besar anggotanya memiliki produksi, misalnya kakao, padi, atau jagung. Koperasi konsumen adalah yang anggotanya memiliki toko, seperti toko sembilan bahan pokok (sembako). Koperasi jasa adalah yang anggotanya menyediakan jasa, seperti jasa pengangkutan, bengkel, atau rumah makan. Sementara koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meminjamkan uang, barang tidak boleh diperjualbelikan dalam koperasi ini.

UU terbaru juga memberikan keleluasaan dalam hal kepengurusan. Dulu, pengurus koperasi hanya boleh berasal dari anggota, tapi sekarang pengurus boleh juga bukan anggota. Apabila saat koperasi dibentuk tidak ada satu pun anggota yang dirasa mampu menjadi pengurus, maka kita bisa mencari orang lain untuk mengurusnya, seperti pengusaha yang berhubungan langsung dengan koperasi tersebut. "Tapi ketika orang ini diangkat menjadi pengurus, diharapkan ia pun akan menjadi anggota koperasi," kata Hasyim.

Diperlukan paling tidak 20 orang dengan kepentingan ekonomi yang sama untuk membentuk koperasi. Jadi jika satu kelompok petani (poktan) sudah memiliki 20 anggota, maka mereka dapat membentuk satu koperasi. Koperasi tersebut wajib memiliki nama, alamat, dan pengurus paling tidak tiga sampai lima orang. Hasyim mengatakan bahwa pengurus koperasi jumlahnya harus ganjil, sangat membantu saat mengambil keputusan.

Rapat anggota dilakukan setahun sekali, biasanya setelah bulan kelima. Dalam rapat ini akan dipaparkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam setahun itu, juga dilihat apakah neraca memperlihatkan keuntungan atau tidak. Rencana kerja untuk setahun ke depan dibuat pada rapat tahunan tersebut. Jika sebuah koperasi memiliki anggota sampai 500 orang, dan dari jumlah itu terdiri dari beberapa kelompok, maka setiap kelompok cukup mendatangkan satu orang sebagai wakil di rapat tahunan. "Agar tidak terlalu ramai ketika rapat," kata Hasyim.

Setelah setahun berjalan maka akan muncul yang disebut dengan surplus hasil usaha (SHU) dan defisit hasil usaha (DHU), di mana dapat diketahui berapa penjualan, berapa biaya operasional, dan lain-lain dalam setahun.

DINAS SIAP MEMBANTU

Sekali lagi Hasyim mengingatkan bahwa koperasi simpan pinjam tidak boleh digabungkan dengan suatu usaha, karena koperasi ini hanya berurusan dengan uang bukan barang. Koperasi lain seperti produksi, jasa, dan konsumen boleh digabung, asalkan masing-masing terhubung oleh suatu kegiatan. Misalnya ada koperasi yang awalnya bergerak sebagai koperasi produksi, tapi sejalan dengan waktu koperasi ini memiliki usaha baru, katakanlah jasa angkutan, maka koperasi produksi tersebut dapat digabung dengan koperasi jasa.

Sekarang ini memang masih banyak koperasi simpan pinjam yang memiliki beberapa usaha sekaligus. Dengan diterbitkannya UU No. 17/2012, maka koperasi simpan pinjam dibatasi kegiatannya, ia harus berdiri sendiri dan jika ingin masuk dalam suatu usaha, maka koperasi baru harus didirikan. Tapi itu bukan berarti membatasi petani untuk memperluas usahanya; dengan UU baru ini mendirikan koperasi justru jadi lebih mudah, tinggal melampirkan berita acara pembentukan lalu membawanya ke notaris yang telah ditunjuk oleh Kementerian Koperasi. Setelah disahkan oleh notaris, maka koperasi pun resmi dibentuk. Berita acara yang telah disahkan kemudian dibawa ke Dinas Koperasi kabupaten/kota untuk diterbitkan badan hukumnya. Setelah semua selesai, maka koperasi pun bisa berjalan. "Runtunannya paling lama dua minggu," kata Hasyim.

Hasyim mengatakan bahwa Dinas Koperasi Provinsi siap untuk membantu poktan yang mengalami kesulitan dalam membentuk koperasi di daerahnya. Dengan catatan, poktan tersebut sudah memahami dasar-dasar pembentukan koperasi yang baru dan paling tidak sudah memenuhi sebagian besar syarat untuk membentuk koperasi. "Kami siap memberikan pendampingan langsung di lapangan," kata Hasyim. ☺

BERIKUT INI ADALAH TIGA SYARAT MUDAH UNTUK MENJADI ANGGOTA KOPERASI

- ① Calon anggota bersedia memberikan setoran pokok, di mana pada pembayaran pertama jumlahnya bisa berapa saja: Rp100 ribu, Rp200 ribu, sampai Rp1 juta.
- ② Calon anggota bersedia memiliki sertifikat modal koperasi, yaitu sertifikat yang dibuat koperasi senilai Rp5 juta sampai Rp10 juta yang bunganya bisa dibeli oleh anggota. Nilai bunga ditentukan sendiri, misalnya 12% atau 20%. "Ini mirip dengan saham," kata Hasyim.
- ③ Hasyim menambahkan bahwa calon anggota bersedia memegang sertifikat selama setahun, agar pada saat jatuh tempo, sertifikat ini dapat dicairkan. Keuntungan jika Anda memiliki sertifikat adalah ketika Anda memiliki utang kepada anggota lain, Anda bisa menjualnya sebagai ganti utang tersebut.

Jika Anda ingin mendapat pendampingan langsung, silakan hubungi:

MUH. HASYIM (Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan)

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Tel: 081524158968 / 081341833569.

Seminar Nasional Sertifikasi
EVALUASI DAN PEMBELAJARAN SAMPAI DESEMBER 2013



KAMI MENGAMBIL TIGA yang dapat mewakili pembahasan dalam seminar ini. Diawali oleh Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St, Direktur Mutu dan Standarisasi Kementerian Pertanian. Ia memberikan presentasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang sistem kakao berkelanjutan, serta keuntungan mengikuti sertifikasi.

Dr. Gardjita menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang Sistem Kakao Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Cocoa/ISCocoa) dan mengembangkan Kebijakan Fermen-

tasi Biji Kakao. Dr. Gardjita mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini nantinya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas kakao, selain meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kakao. Dengan sistem ini pemerintah juga ingin mengurangi kerusakan lingkungan dan sosial, serta membuat sarana perdagangan yang adil.

Dr. Gardjita menekankan bahwa petani yang mengikuti sertifikasi akan mendapatkan jalur ke pasar yang lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. "Petani pun mendapatkan harga premium," katanya.

Pada 10 Desember 2013 lalu, Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Seminar Nasional Sertifikasi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menarik pembelajaran dari program sertifikasi sampai akhir 2013. Evaluasi diberikan lewat presentasi oleh beberapa ahli dalam sektor kakao. Berikut rangkumannya.

Lebih jauh mengenai ISCocoa, Dr. Gardjita mengatakan, sistem ini merupakan program sertifikasi yang menggunakan pendekatan berdasarkan risiko serta perbaikan yang terus menerus. "ISCocoa dirancang untuk mengawasi perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka yang mendapat sertifikasi, serta digunakan untuk meningkatkan dampak positif praktik berkelanjutan dalam sistem produksi," katanya. Ia juga menyampaikan bahwa ISCocoa mengacu pada persyaratan sistem standarisasi nasional maupun internasional yang sekarang berlaku.

ISCocoa dirancang untuk mengawasi perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka yang mendapat sertifikasi, serta digunakan untuk meningkatkan dampak positif praktik berkelanjutan dalam sistem produksi.

Sementara itu latar belakang dibuatnya Kebijakan Fermentasi Biji Kakao adalah:

- Biji kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani
- Biji kakao yang tidak diragi (fermentasi) mutunya rendah
- Adanya pemotongan harga di luar negeri sehingga harga di tingkat petani lebih rendah dari harga internasional
- Industri kakao dalam negeri kekurangan bahan baku
- Tuntutan pasar akan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi
- Harga untuk mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi masih sangat mahal.

PEMAHAMAN MENGENAI SERTIFIKASI

Sementara itu Prof. Sikstus Gusli, Guru Besar Universitas Hasanuddin, memberikan presentasi mengenai kebiasaan petani kakao Sulawesi dan manfaat sertifikasi terkait masalah sosial dan lingkungan. Kebiasaan petani kakao Sulawesi, yang secara tidak langsung menjadi tantangan dalam penerapan sertifikasi, dijabarkan Prof. Sikstus sebagai berikut:

- Kebanyakan petani kakao Sulawesi belum mau membentuk kelompok, koperasi pun tidak ada atau sistemnya tidak dijalankan

- Pendidikan petani masih rendah, terutama yang berusia dibawah atau sama dengan 31 tahun (Sebanyak 30% tidak bersekolah, dan kurang dari 50% hanya tamat SD)
- Banyak petani yang memiliki lahan kurang dari satu hektar atau jumlah pohonnya sedikit
- Tidak terbiasa dengan peraturan tertulis
- Segan untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya
- Masih tergantung pada pupuk kimia
- Masih banyak anak usia sekolah yang bekerja di kebun
- Mulai tertarik pada komoditas lain.

Menurut Prof. Sikstus petani harus diberi pemahaman yang mendalam mengenai sertifikasi, terutama mengenai manfaatnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sertifikasi membuat petani memiliki catatan mengenai usaha tani mereka, terutama terkait penjualan kakao dan penggunaan sarana produksi. Petani bakal lebih memahami mutu, lebih sadar akan masalah kesehatan, peran perempuan, serta lingkungan. “Dengan adanya catatan, penggunaan sarana produksi pun akan lebih efisien,” kata Prof. Sikstus.

PERBANDINGAN DENGAN KOPI

Pada kesempatan ini juga hadir Soetanto Abdoellah, peneliti dari Pusat Pen-

litian Kopi dan Kakao Indonesia, yang memaparkan perkembangan kegiatan sertifikasi dalam sektor kopi sebagai perbandingan. Dalam presentasinya Soetanto memperlihatkan bahwa pada awalnya, kegiatan sertifikasi dalam sektor kopi dilakukan oleh lembaga sertifikasi asing atau cabangnya.

Namun dalam lima tahun terakhir, muncullah lembaga-lembaga sertifikasi nasional yang terakreditasi, seperti Bio-cert, Sucofindo, SDS Indonesia, CCQC, Inovis, Lesos, Persada, Dispertanpang Sumbar, dan Mutu Agung Lestari. Semua lembaga tersebut diberikan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan menggunakan IEC ISO 65. Sementara itu lembaga-lembaga sertifikasi internasional tetap melanjutkan kegiatan sertifikasi kopi berkelanjutan di Indonesia, seperti Control Union, NASSA, CERES, IMO, RA, dan SGS.

Pada sektor kopi, sertifikasi dibayai oleh perkebunan itu sendiri, yang umumnya perkebunan besar, sehingga sertifikat juga dipegang oleh perkebunan tersebut. “Untuk petani kecil, sertifikasi biasanya dibayai oleh pedagang atau pengekspor, sehingga sertifikat juga dipegang oleh mereka,” kata Soetanto. Peneliti ini mengatakan bahwa petani kopi belum dapat memegang sertifikat sendiri karena keterbatasan biaya, jaringan, dan pasar. Kontak langsung antara pembeli dengan petani yang mengabaikan pedagang perantara juga masih menjadi masalah peka dalam pelaksanaan sertifikasi. ☉



Rapat Koordinasi Teknis
Kebijakan Kakao 2014

EVALUASI DAN RENCANA KE DEPAN

Awal Maret lalu CSP dan beberapa pemegang kepentingan diundang Musdhalifah Machmud, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura, untuk menghadiri rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Kakao 2014. Igor Rangga melaporkan.

PEMBAHASAN PERTAMA adalah mengenai Peta Jalan CSP. Musdhalifah yang bertindak sebagai pemimpin rapat mengatakan bahwa diperlukan kerja sama antara CSP dan pemerintah dalam menjalankan Peta Jalan tersebut. "Karena selama ini pemerintah juga terlibat dalam kegiatan CSP," kata Musdhalifah.

Melalui rapat ini Musdhalifah meminta CSP untuk menulis peta jalan dalam Bahasa Indonesia. "Agar pembahasannya menjadi lebih mudah," kata Musdhalifah. Di awal 2014 ini ia pun berharap ada diskusi antara CSP dan pemerintah untuk membahas lebih lanjut mengenai Peta Jalan tersebut.

SELISIH DATA

Rapat kemudian membahas mengenai data produksi kakao terakhir. Ada perbedaan antara data pemerintah dan Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO). Data pemerintah sampai akhir 2013 adalah 780,000 ton, sedangkan ASKINDO 460,000 ton. Musdhalifah mengatakan bahwa selisih data disebabkan oleh cara pengambilan data itu sendiri. Kementerian Pertanian mengambil data sesuai dengan susunan pemerintahan yang ada, dan data tersebut telah disahkan oleh bupati atau gubernur. "Di lapangan juga terjadi bahwa lahan kakao yang telah beralih guna belum dilaporkan ke pemerintah daerah," kata Musdhalifah.

Menurut Musdhalifah data yang diterima pemerintah pusat sangat memengaruhi kebijakan. Ketika data yang diterima su-

dah disahkan oleh gubernur, bupati, atau kepala dinas maka data itulah yang menjadi acuan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan, termasuk kebijakan Gerakan Nasional (Gernas) Kakao. Musdhalifah mengatakan jika menurut data produksi suatu daerah sudah mencapai 700 kg, maka pemerintah tidak akan memberikan bantuan bibit lagi lewat Gernas.

COCOA DAY 2014

Lebih jauh mengenai industri cokelat Musdhalifah mengatakan bahwa industri ini tidak hanya memerlukan promosi besar-besaran, tapi juga daya cipta yang tinggi, maksudnya produk yang dihasilkan jangan sampai membosankan bagi konsumen. Tantangan industri kakao memang berat karena persaingannya tinggi. Musdhalifah mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk menjaga agar industri bisa terus berproduksi, supaya bisa terus menyerap tenaga kerja.

Pembahasan terakhir yaitu mengenai Cocoa Day 2014 yang akan dilakukan September ini. Ada usulan untuk melaksanakannya di Makassar, Sulawesi Selatan agar petani dapat ikut serta. Ada usulan lain untuk tetap melakukan Cocoa Day di Jakarta dan menggabungkannya dengan acara lain, seperti Trade Expo dari Kementerian Perdagangan, atau Interfood. Musdhalifah sendiri setuju untuk melakukan Cocoa Day di daerah, Mengingat kakao adalah 'milik' seluruh Indonesia. "Ada baiknya kita melaksanakan acara itu di kota lain selain Ibu-kota," kata Musdhalifah. ©

FREE

ISSUE MARCH-MAY 2014

COKELAT

The advancement of communication



**INDONESIAN
EMERGING COCOA
PRODUCERS:
a complete story**



EDITOR'S note

AS ONE OF THE INDONESIAN COMMODITIES, cocoa has a strategic role in the economy of Indonesia, it ranked the third as foreign exchange earner in the state crop sector. In 2012, cocoa has contributed income of USD1,053,446,947 from cocoa beans export and processed cocoa products*.

Some government policies in promoting downstream industries in the country bring proven results in the development of Indonesian cocoa industry. One of them is the Indonesian National Standard (SNI) in order to maintain the outstanding quality of cocoa powder in the country. Downstream industry program initiated by the Ministry of Industry was also able to raise the national cocoa industry that can compete, both in domestic and global markets, as well as contribute in supporting the economic growth of our country.

Currently, the global cocoa demand growth is of around four million tons per year. Data from the International Cocoa Organization (ICCO) stated that in the last five years, demand for cocoa grew an average of 5% per year. In the future, cocoa has a great power to be developed. It is estimated, the consumption of cocoa in Indonesia, India, and China will reach 1 kg / capita / year so that there will be an additional demand of about 2,2 million tons of cocoa beans per year.

In this edition, we will be presenting regions that are in development to become major producer of cocoa and policies that they have to make to meet future demand. You can also see small industries flourished and many foreign investors started to build new factories in Indonesia. Sustainable production and productivity increase programs can also found in this issue.

We all hope that, with the participation of government, Indonesia will be the largest cocoa producer as well as the number one chocolate consumer in the world.

Happy reading!

*Public Communication Centre Ministry of Industry, September 2013.



PUBLISHER : Rini Indrayanti
EDITOR IN CHIEF : Igor Rangga
DESIGN : Frisca Imelda

SECRETARIAT:
Cocoa Sustainability Partnership (CSP)
Graha Pena Lt.8 Suite 804-805
Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar
Tel: 0411 436 020
Fax: 0411 436 020
Email: communicationcsp@outlook.com



Cocoa Sustainability Partnership



18

◀ Rediscovering
the lost glory.



8

Evolving with
many parties.

Contents

- 6 The Spearhead of Cocoa Flores Development**
- 15 Who Eats More Chocolate?**
- 16 Heavily Increasing Farmer's Capacity**
- 25 To Build Cooperation among Stakeholders**
- 26 Emerging Largest Cocoa Producer in Indonesia**
- 28 Supporting Farmers in Opening Business**
- 30 Evaluation and Lesson Learned Until December 2013**
- 32 Evaluation and Future Plans**



12

Everything to
boost productivity.



22 Guarding the
Indonesian cocoa
industry.





MAIN REPORT

8

West Sumatra

12

Padang Pariaman

18

West Sulawesi

22

South Sulawesi

The ability of Sikka District to produce cocoa arguably greater than other districts in Nusa Tenggara Timur province. Is there any government strategy to explore the capabilities? Read our conversation with the Regent (Bupati) Drs. Yosef Ansar Rera, and Head of Sikka Agricultural and State Crop Office (Kadistan) Ir. Mauritius T. Da Cunha in Maumere recently.

SIKKA DISTRICT

THE SPEARHEAD OF COCOA FLORES DEVELOPMENT

THERE ARE THREE DOMINANT SECTORS OWNED BY SIKKA, namely marine and fisheries, agriculture and horticulture (with three commodities like cashew, coconut, and cocoa), as well as tourism sector. The Bupati says, programs which are developed to support the three sectors for the next five years, are actually based on what has been developed by the community itself.

Sikka arguably is the first step in the development of cocoa Flores, can be seen from cooperation of local government with Support of Small Poor Cocoa Farmer (SPSCF) program.



The program itself was supported by Yayasan Sahabat Cipta, World Vision Indonesia, Hille Foundation, Swisscontact, Mars Incorporated, and VECO Indonesia. "In the near future, after Sikka, other districts could also contribute in the development of cocoa," said Bupati.

UTILIZING SLEEPING FIELDS

Cocoa does have a greater chance in Sikka District compared to other districts in Flores Island. Why? Because soil condition in Sikka is more suitable for cocoa planting, therefore coca-



Bupati Drs. Yosef Ansar Rera.

producing centres are more often found in Sikka. Bupati said that there were still a lot of unused lands which were ready to be developed for cocoa plantations, and local government was preparing steps to open them. "Through SPSCF we will start from field expansion, then increasing production, processing, and marketing," said Bupati.

Unused land according to Bupati are mostly found in western Sikka District, current numbers are around 21,000 to 22,000 acres. Meanwhile, according to Sikka Agricultural and State Crop office data, when Cocoa National Movement (Gernas) began in 2009, Sikka also allocated 10,000 acres of fields ready to work on. "Since it was very extensive, so far only 3,000 hectares of Gernas area successfully cultivated until the end of 2013," said Kadistan.

If you look upon other districts, Ende actually has similar potential to Sikka in the ability to produce large quantity of cocoa in Flores. Number of land ready to be developed for cocoa in Ende is also very extensive. However, since transportation facilities are still limited, it is often hampered Ende to market its cocoa. "They still need to go through Maumere to sell the cocoa, a three-hour drive through the hills from Ende," said Bupati.

In helping to improve cocoa production in Sikka, Bupati has prepared several policies, as mentioned earlier, starting from land expansion. Then replanting, open access to good fertilizers, and improving post-harvest processes. Until now,

many farmers in Sikka have never done post-harvest process such as fermentation, although some groups have done other postharvest process such as cocoa powder manufacture. "For packaging manufacture we need to learn more, so as not to be outdone with chocolate packaging from other areas," said Bupati.

REGIONAL DEVELOPMENT

In addition to policy, Sikka apparently planning a program called People's Economic Movement. The Bupati said that cocoa development in Sikka cannot solely rely on government and its members, but the community should also contribute. "Through this, people are stimulated to make initiatives. After initiatives are formed, the government will putting the facilities," said Bupati. This movement is included in the Medium Term Development Plan, and will be implemented starting this year.

Regional development is also implemented in Sikka, by dividing the district into three clusters, namely the western cluster (Sub-district Mego, Paga, and Tanawawo), central cluster (Sub-district Mika, Koting, Lele, and Lela), as well as the eastern cluster (Hewokloang, Bola, Doreng, and Mapitara). According to Kadistan, division of these clusters will be handled from upstream to downstream, as preparation for production, post-harvest, processing, to marketing, and will be based in the town of Maumere. "We subdivide each of these clusters into smaller groups in order to obtain accurate data, how much fields have been cultivated, and how many farmers are involved," said Kadistan.

Bupati said, to begin the cocoa Flores development from Sikka was just right, if we looked on its fertile soil, geographical location, and the presence of a sea port. In addition, Bupati believes that the implementation of SPSCF program in Sikka District will open an opportunity for communities to increase revenue. "In order to achieve this objective, local government is ready to help and work together, not only now, but onwards," said Bupati concluded. ☉



Head of Sikka Agricultural and State Crop Office
Ir. Mauritius T. Da Cunha.

WEST SUMATRA PROVINCE

EVOLVING IN PARTNERSHIPS



Mr. Edi with his farm results.

West Sumatra knows cocoa as old as other provinces in Indonesia, namely since 1979 when Directorate General of State Crops launched the Farming Development Program. At that time only one district being developed into cocoa farm.

UNFORTUNATELY AFTER 1979 not much was heard about cocoa from West Sumatra, how they produced, what had been produced, how broad was the area, seldom known. Until former Vice President Jusuf Kalla declared West Sumatra as the centre of cocoa producer for western Indonesia in 2006.

The declaration apparently made cocoa sector in this province escalated. The Provincial State Crops Office (Disbun) supports this declaration by replacing all random seeds with cloned seeds. They also run socialization to all districts and cities, provide insights to farmers that growing cocoa can increase their income.

Slowly but sure, the area expanded to 139,000 ha, which formerly only 25,000 ha in 2006. The province also managed to produce up to 69,000 tonnes of cocoa beans in 2012, with central producers spreading from Pariaman,

Kepala Dinas Ir. Fajarudin.



Lima Puluh Koto, to Pasaman which directly adjacent to North Sumatra. However, planting in a larger scale has not yet to be fulfilled, "Farmers in West Sumatra are very diverse; they have rice fields, horticulture farms, livestock, and fish," said Ir. Fajarudin, Head of Province State Crops Office (Kepala Dinas) whom we met in late January.

Cocoa farms in West Sumatra are generally managed by smallholders with limited area, as most of them live on the hills of Bukit Barisan. To solve the problem, farmers often overcome it by planting cocoa in coconut farm, which would provide a double benefit. "From one farm they can produce two commodities, coconut trees also protect cocoa trees from direct sun light," said Fajarudin.

NAGARI MODEL KAKAO

To support the declaration of West Sumatra as the largest cocoa producer in western Indonesia, Disbun apparently

has a way to increase production and productivity. Fajaruddin said that cocoa farmers in West Sumatra today really need examples and practices, theory does not appeal to them. Disbun gives close attention on the situation by designing a development that could make farmers receive knowledge directly, quickly, and accurately. "We saw many farmers were just simply planting the cocoa, they leave the rest to God," said Fajarudin.

Disbun then set three areas of facilitation, namely maintenance, post-harvest, and processing. Disbun is no longer focused on land expansion, because they are confident that when cocoa is treated well, it will produce more.

The three main facilitation areas then embodied into crop quality improvement activities, pruning, field school, and recently, the Nagari Model Kakao (NMK). Nagari Model Kakao is a nagari (village) development program which comprehensively planned and

Disbun is no longer focused on land expansion, because they are confident that *when cocoa is treated well, it will produce more.*

WEST SUMATRA STATE CROPS OFFICE'S FIVE MAJOR PROGRAM

1. The increase in production, quality, and productivity
2. Improved quality of results and post-harvest
3. Improvement of human resources (HR)
4. Wastelands revitalization
5. Development of production area

appropriately integrated with existing problems. NMK involves bodies such as West Sumatra Research Centre for Agricultural Technology (BPTP), and the Faculty of Agriculture Universitas Andalas (UNAND), Padang, so it is expected cocoa commodity could motorized the economy of a nagari, which then create a prosperous society. The impact is also expected to be visible by other nagaris and surrounding sub districts.

Fajarudin said that before, trainings to farmers were distinguished by year. For example, in first year farmers are given guidance on pest and disease control, pruning in second year, and third year for post-harvest processing. "When NMK started, trainings are done at once, including farmer empowerment, pest control, processing, and so on," said Fajarudin.

According to Ir. Yusniar, M.P. (Disbun's Head of Utility and Infrastructure Department), so far there are 175 to 200 UNAND Faculty of Agriculture students who routinely support for every running programs. In early stages, students will receive guidance from Disbun in seven to eight meetings, after which they will be released to the field. At First, these students have to practice pruning and pest control, which is key in cocoa farming activities in West Sumatra today.

After pruning and pest control, students will begin to learn top grafting. "By working directly in NMK, the love and interest of the students for cocoa will grow stronger," said Fajarudin. Kepala Dinas also added that by working with students, assistance to farmers can be done as often as possible and the health of cocoa farms will be maintained.

70 BEANS PER 100 GR

Nagari Model Kakao has had tremendous impact for cocoa industry in West Sumatra. A new clone had been created in a farm belonging to Edi Syafianto, a cocoa farmer of Payakumbuh origin, whose farm instantly became not only a demonstration plot for Sumatra, but also for the whole of Indonesia.

The farm is often visited by farmers and some other stakeholders from East Java, West Java, West Kalimantan, and Banten. Yusniar says that all stakeholders who have visited Edi's farm are surprised to see pods of which can produce 60 to 70 seeds per 100 gr. With the size and number of beans it produces, no wonder this clone had been declared as the local superior clone and named BLB 50. "This clone won the third place on national clone championship last year," said Yusniar.

Besides NMK, West Sumatra Provincial Government (Pemprov) also has a program that encourages farmers to have at least three crops, and for plantation commodities, Pemprov enters through cocoa. Program called The Farmer Welfare, is a collaboration between Disbun and Extension Worker Coordination Office (Bakorluh) to provide guidance at district and city level. "Before Bakorluh goes to the field, they will have discussion with Disbun to prepare a work plan and material to be taught specifically for cocoa farmers," explains Fajarudin.

SUPPLYING GOODS TO CAPITAL CITY

As in other provinces, fermentation has not been done by many farmers. According to Disbun data, there are only five farmer groups (poktan) that



Field school conducted by Disbun.



Products of UPH Chokato.

Give farmers opportunities and let them manage themselves, until the point they need to grow larger, that's when they will need assistance.



PROVISION OF SUPERIOR SEEDS BY WEST SUMATRA PROVINCE UNTIL THE END OF 2013

- Cocoa 825,000 stems
- Palm oil 122,500 stems
- Rubber 382,000 stems
- Coffee 50,000 stems
- Coconut 32,500 stems
- Nutmeg 23,500 stems
- Clove 16,600 stems

perform fermentation process, and it is because farmers are not sure who would buy their fermented beans, plus the price difference is not significant.

To solve these problems, annually, Disbun stimulate farmers by providing fermentation boxes for all poktan. In addition, there is a processing unit (UPH) in Payakumbuh named Chokato which routinely purchase fermented beans in small quantities. Currently Disbun still make dispensation for farmers on the amount of fermented beans. "No need to get a ton, but the amount should be fixed and delivered on appropriate time," said Fajarudin.

Fajarudin found fermentation should be done by farmers; in order to maintain quality, UPH under Disbun's guidance requires farmers to sell fermented beans. Fajarudin wants to follow an UPH in Yogyakarta which slowly been able to buy up a ton of fermented beans. "My hope is fermentation boxes that we provide will inspire farmers to produce more fermented beans," said Fajarudin who saw a rapid development in the cocoa industry in West Sumatra.

Although growing rapidly, Kepala Dinas does not necessarily rush to build large processing unit. He still highlights

on small industry with results of semi-finished goods. He said at one point large industry will only add value to farmers in the form of beans. "Semi-finished goods' prices from West Sumatra as powder and butter have been really high, and our UPH in Pariaman and Payakumbuh have been supplying goods to Jakarta, Bandung, and Riau," said Kepala Dinas.

MORE INDEPENDENT

When asked about provision of credit to farmers, Fajarudin admits no extension of credit to farmers. There is only a grant in the form of motorcycle to help farmers in marketing their cocoa. Disbun's reason not to give credit because they see, with NMK alone farmers groups have succeeded in intensifying production. Meanwhile, farmers also feel there is no need to take credit, they say they will ask for credit after group management is working well and many farmers join in. "Give farmers opportunities and let them manage themselves, until the point they need to grow larger, that's when they will need assistance," said Fajarudin. ©

*Find out more about Nagari Model Kakao (NMK) approach at this address
<http://1drv.ms/1eUxnR>*

WEST SUMATRA MAIN COMMODITIES AND PRODUCTION AREA UNTIL THE END OF 2013

| YEAR | COCOA | | PALM OIL | | RUBBER | | ARABICA | | ROBUSTA | |
|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | AREA (HA) | PROD (TON) |
| 2009 | 84,254 | 40,250 | 344,351 | 833,485 | 166,719 | 133,816 | 23,185 | 21,294 | 24,707 | 16,658 |
| 2010 | 101,014 | 49,638 | 353,411 | 910,309 | 167,416 | 137,377 | 20,724 | 14,796 | 19,843 | 15,106 |
| 2011 | 117,014 | 59,836 | 356,140 | 922,746 | 170,250 | 139,687 | 20,742 | 14,857 | 19,843 | 15,203 |
| 2012 | 137,355 | 69,281 | 357,059 | 941,579 | 172,186 | 139,687 | 20,754 | 14,876 | 19,886 | 15,259 |
| 2013 | 148,343 | 74,171 | 364,220 | 955,153 | 176,975 | 159,277 | 21,169 | 16,939 | 19,934 | 16,227 |

Source: West Sumatra Province State Crops Office.

Area of cocoa farms in Pariaman, until the end of 2013, are 'only' 18,000 ha, and from that, only 7,671 ha have produced cocoa beans. How do they increase productivity with their limited condition? Join Igor Rangga's conversation with Pariaman Head (Kepala Dinas) of Agriculture, State Crops, and Fisheries Office (Dinas) on following article.

PADANG PARIAMAN DISTRICT

EVERYTHING TO BOOST PRODUCTIVITY



KSU Padang Manih Sakato in Sub-district V Koto Kampung Dalam.



Adam Chocolate product of KSU Padang Manih Sakato.

THOUGH IT IS LIMITED, the condition even makes Kepala Dinas Yurisman Yakub, S.P., M.M. more motivated and planned to expand Pariaman cocoa fields. Not by opening new areas, but with intercropping with coconut trees which now have reached the extent of 40,000 ha. "People won't find many cocoa fields in Pariaman," said Yurisman smiling. Productivity of the district two years ago was still below the national productivity, namely 743 kg per hectare per year, while number of production was 5.669,5 tons.

Dinas' consideration to plant cocoa inside coconut farm because most of the land in Pariaman already planted with agricultural or other commodities. Currently Dinas has not been able to replace rice or corn field with cocoa.

Intercropping with coconut is also *beneficial for farmers*, because when cocoa waste dumped into the rorak, *it fertilizes the soil*.

Even so, Dinas had been running a number of activities to support the ‘expansion’ through coconut farms. Assisted by Provincial Government of West Sumatra (Pemprov Sumbar) to spread the seeds on coconut farms, they also rejuvenate old cocoa trees or those productions have declined by side-grafting technique. “For side-grafting implementation we are assisted by Swisscontact,” said Yurisman.

Through Provincial Revenue and Expenditure Budget (APBD) implementations have been carried out to the community through field school and diseases (CPB) eradication trainings. As for improving the farmers’ welfare, Provincial Government had supported the development of Nagari Model Kakao (NMK) in Padang Pariaman. “This year our NMK ranked number two in West Sumatra for its effort to increase farmers’ welfare,” said Yurisman.

Kepala Dinas said that Pariaman NMK had succeeded to increase production exceeding average productivity in Pariaman even Sumbar, it has reached 1,3 tons per hectare per year. The success apparently aided by integrating cocoa farms with cattle, where the manure is processed into organic fertilizer. Yurisman himself argues that organic fertilizers are much better than chemical fertilizers. “With organic fertilizers, not only the cocoa trees that will get healthy, but also the soil,” he said.

A PROMISING COMMODITY

Yurisman told that cocoa was once regarded as secondary commodity by most farmers in Pariaman, because their main job was as agricultural farmers. But over time, they began to see that cocoa is a commodity that could be relied upon, although it still couldn’t be made as the main crop. This can be seen from the way farmers use their income from selling their cocoa. “The money are often used to finance children’s school or buying supplies for the Eid,” said Yurisman.

Intercropping with coconut is also beneficial for farmers, because when cocoa waste dumped into the rorak, it fertilizes the soil. Coconut trees even produce more fruits and can be harvested more often; from only once every three months, to once a month. “Planting cocoa brings indirect benefit to other commodities,” said Yurisman. See-

ing this, the district government immediately thinking on how to improve their productivity.

In 2004, the district of Padang Pariaman had made an initiative to produce large quantities of cocoa, even before the declaration of Sumatra as the largest cocoa producer in western Indonesia. “We started by planting one million seedlings,” said Yurisman. The initiative grew stronger after Pariaman Regent visited Riau Province and saw the effort to produce cocoa in large quantities. The Regent even participated in cocoa cultivation training held by Riau Provincial Government.

FERMENTATION WELFARE THE FARMERS

When asked about fermentation activities in Pariaman, Kepala Dinas answered it with enthusiasm. To promote fermentation activities, Dinas started by providing fermentation boxes. Directorate General of Processing and Agricultural Development (Ditjen PPHP) followed by giving a grant in the form of a mini factory established in Sub-district V Koto Kampung Dalam. The factory which runs by Padang Manih Sakato multi business cooperative (KSU) had produced a product called Adam Chocolate. “This product can be found at Lapau Cokelat, a cafe in downtown Pariaman,” said Yurisman promoted.



Kepala Dinas Yurisman Yakub, S.P., M.M.

After fermentation boxes, Dinas gave farmer groups several cocoa drying tables, accompanied by educating farmers that cocoa beans which deserve to go to factory were beans that had been fermented and dried with drying table. "Education is given on an ongoing basis," said Yurisman. Slowly but sure, the impact of education is beginning to emerge, a lot of farmers have done fermentation and dry cocoa with drying tables.

It can be seen that fermentation is important, because processing units can only produce selling products when they can get fermented beans. Fermentation indirectly drives local economy so that farmers' welfare will increase. "When Lampung Parliament and District Government visited the mini factory, they were stimulated to participate in the welfare of cocoa farmers by promoting fermentation process," said Yurisman.

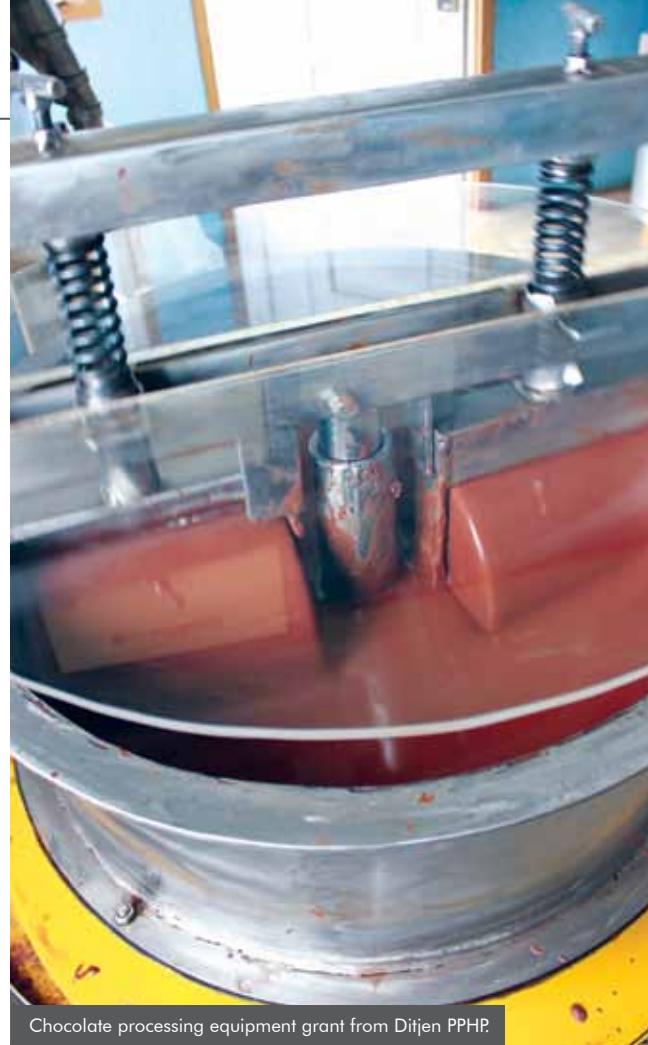
ALL FOR THE SAKE OF PRODUCTIVITY

In order to achieve even higher production and productivity, Dinas runs an advanced program for each nagari (village), where each nagari is provided with an extension worker who visits farmer groups every Wednesday and runs pruning and counselling rounds. Not only counselling, the extension worker will gather information such as which group that needs pruning or other necessary tools. "The information we received will be followed up by provision of tools," said Yurisman.

Not only pruning, pest control also needs to be done to improve productivity. Pest which is quite problematic in Padang Pariaman, besides CPB, is squirrel which likes to eat cocoa beans. To that end, in collaboration with Indonesian Rifle Shooter Community (KOMPESENA), every year Pariaman farmers do the squirrel hunting festival, where each squirrel killed will be appreciated Rp5,000. "This activity proved to be very helpful for the cocoa farmers," said Yurisman.

Lending credit through People's Business Credit (KUR), which integrated with farmer groups, is another Dinas' program to increase production. Along with that, there is a revolving fund managed and implemented with Bank Nagari.

Yurisman acknowledge that works related to farm maintenance are not easy. Because of this, Dinas' attention at this moment is focussed to the 7,671 ha, how to maintain its production. While other farms, which spread on over 11 sub-districts, will be handled one by one. Regarding credit



Chocolate processing equipment grant from Ditjen PP&H.

provision to increase productivity, sometimes it is not running smoothly, hindered by Orang Minang tradition. Why?

In order to give credit, the bank will need collateral. Because most of the land in West Sumatra is *tanah kaum* (owned by community), it is quite difficult to acquire certificate. Persons entitled to the land are not just those who live in the village, but also they who live overseas. "This makes process to obtain a certificate can be very long," said Yurisman. But he assured that currently National Land Agency (BPN) is developing a project called the National Project (ProNa), where requirement to obtain a certificate will be easier and the public will not be charged a penny.

Last but not least is to involve High School for Agricultural Studies (SPMA) students and faculties of agriculture in farming activities, as well as introducing cocoa to non-farmer community. Students who go into the field are those who participated in the Thematic Field Work Study (KKN), and so far students from Universitas Andalas, Padang and Universitas Padjadjaran, Bandung had been completed the KKN. "We hope with all these activities, Pariaman can achieve the 2004 initiative and becomes the largest cocoa producer, at least in Sumatra," said Yurisman concluded. ☺

WHO EATS MORE Chocolate*



*Per capita chocolate consumption data comes courtesy of Leatherhead Food Research with the exception of India and China figures, which come from Mintel and Rabobank respectively.



Great Palace of Pagaruyung, the pride of Tanah Datar community.

TANAH DATAR DISTRICT

HEAVILY INCREASING FARMER'S CAPACITY

Tanah Datar District Government through Agriculture, State Crops, and Forestry Office (Dinas) in the last five years has been demanded to increase its cocoa cultivation. Read the following review to see methods that have been implemented.

ACCORDING TO HEAD OF OFFICE (Kepala Dinas) Ir. Edi Arman, for the last few years more and more people are eager to cultivate cocoa. Kepala Dinas warmly welcomes such tendency, but by planting thousands of seeds would be enough? Edi is thinking, what is the best method to respond to such demand. "In the last a few years, cocoa in Tanah Datar is being developed on a large scale," said Edi.

Edi said that after 2006, Tanah Datar had successfully developed more than 5,000 hectares of land. When it was begin to develop, there was only 100 ha of cocoa fields; but since people learned cocoa as an export commodity and had good prices in the future, they gave even higher interest.

Community's interest can be seen from number of proposals submitted to the Dinas, and when it is calculated, there is still more than 6,000 ha of land ready to be worked on. "Now we are seeking whether the funds for cocoa development and cultivation can be obtained from State Budget (APBN), or assisted by Provincial and District Budget (APBD)," said Edi. As additional information, from Cocoa National Movement (Gernas) alone, Tanah Datar received approximately 1,000 ha.

READY TO ASSIST

Community's desire to cultivate cocoa is huge, but they have very little knowledge about cocoa farming. Dinas then requested support from West Su-

matra Provincial State Crops Office (Disbun) to provide the integrated pest control field school (PHT), pruning courses, and post-harvest processing courses. "After everything has been implemented, gradually Tanah Datar farmers could face problems they usually faced in farming," said Edi.

Until the end of 2013 approximately 500 farmers have been trained, and it is hoped that in 2014, Dinas can get support from district budget in order to train another 300 farmers. "There are still many farmers who need to be trained, because their knowledge is limited only for planting, while for maintenance, many do not understand," said Edi.

In improving cocoa cultivation, Dinas have some other ways, namely through a movement called the Cocoa Farm Maintenance and Pest Control. There is a working group that has been formed to carry out this movement, which functions to answer questions from community; how to combat pests and disease, how to process the harvest, and how to fertilize the soil. Through this group Dinas is ready to assist, even ready to receive calls either through mail or phone.

IMPACT ON PRODUCTION

The other way that Dinas does is to provide counselling for farmers through visit pattern. Farmers are visited and trained to perform a variety of practices, starting with 10 cocoa stems. When it feels that most farmers have understood, they



Kepala Dinas Ir. Edi Arman.

will be left alone, so they can learn fast and can identify any problems that occur in the field.

Speaking of training, Edi was pleased to be working with one of CSP members, namely Swisscontact. The cooperation proved to be effective, especially in combating CPB and black pods. "Thankfully because there are number of courses and field school patterns, farmers' initiative to take care of their farms are growing," said Edi.

Edi observes that despite the economic crisis everywhere, cocoa prices remain steady, unlike rubber that has a very large devaluation. Even at the beginning of 2014 cocoa price was at Rp30,000 per kilogram. Therefore Edi is convinced, that cocoa sector can really improve the local economy of Tanah Datar. Especially after Provincial Disbun and Central Government gave assistance, now Dinas can run a program every year. In 2013 Dinas Tanah Datar was also given 75,000 seedlings by provincial Disbun.

With field school, Edi notices that there are improvements in the quality of maintenance which have a positive impact on production. As evidence, Tanah Datar's farmers no longer get only Rp300,000 every harvest time, but they can get Rp700,000. In fact, there are some farmers who usually only get Rp600,000, now they can get at least of Rp1,000,000.

FOCUS ON CAPACITY BUILDING

When asked about fermentation, Kepala Dinas said that as long as the price difference between fermented beans with unfermented beans is not much, he will not require farmers to do fermentation. "The decision I leave to them," said Edi.

According to him, to produce fermented beans farmers require more time and labour. If the price offered is not much, certainly, economically farmers will feel the loss. "The quality is better, but if fermented beans are valued for only Rp2,000, I myself would think twice," said the Kepala Dinas. Edi already submitted this subject to Tanah Datar Cocoa Forum some time ago, where several stakeholders from Jakarta also attended.

Associated with fermentation process, Kepala Dinas once offered to build a cocoa processing unit, but because not many farmers who do the process, this offer he rejected. Edi admitted that he had planned to build a processing unit, but only if there were already 50% of farmers who perform fermentation. "Right now we are focused on increasing capacity first, if this has gone well, then we would think to build a processing unit," said Edi concluded. ☎

WEST SULAWESI



Governor H. Anwar Adnan Shaleh, originator of Sulbar's Cocoa Revitalization Movement (GPK).

REDISCOVERING THE LOST GLORY

It would not be exaggerating to say that once West Sulawesi (Sulbar)'s income was derived from cocoa. At that time market ability and cocoa price were very promising which triggered euphoria in the community. They switched to cocoa planting until the area of cocoa farms extended to 200,000 ha.

UNFORTUNATELY SULBAR ability to produce cocoa had declined because of several causes such as aging trees, poor production management system, and lack of maintenance. It all raises variety of issues that have impacted on productivity. The situation is exacerbated by pest epidemic, and it is worsen with the overuse of pesticides. All those cause turmoil in society, leaving some farmers switched from cocoa to other commodities.

Even so, area for cocoa in Sulbar are still 172,000 ha. This then triggers the spirit of Governor H. Anwar Adnan Shaleh to restore the glory of Sulbar cocoa by declaring Cocoa Revitalization Movement (GPK), which was followed by supporting the central government initiative's Cocoa National Movement (Gernas). "The passion for growing cocoa reappear after that," said Ir. Supriyatno, M.M., Head of West Sulawesi State Crops Office (Disbun) whom we met last February.

REVIEWING THE FUNDAMENTAL PROBLEMS

Supriyatno said that only a small area in the world suitable to grow cocoa, one of which is certainly Sulbar. The province also has the advantage of people who have known how to grow cocoa for a long time. However, it does not guarantee that it improves farming management system, or soil fertility. "We do not even have strong farmer institutions," said Supriyatno.

Local government (pemda) was then identified the issues that occurred, namely:

- ✿ Low productivity
- ✿ Low quality beans
- ✿ Unfavourable market system
- ✿ Poor farming practices, and
- ✿ Pest and diseases.

The issues were directly addressed by the Governor by launching three initial activities, namely:

- ✿ Provision of fertilizer
- ✿ Provision of pheromones to control fruit flies, as well as
- ✿ Provision pruning scissors.

Not only that, for the sake of improving farmers welfare, productivity, and quality of beans, Supriyatno then split Sulbar into several clusters that would become cocoa development and management centres. Cluster management is expected to solve on-farm and market problems.

EMBRACING YOUNG FARMERS

In order to hone farmers' skill, Disbun intensified training of trainers (TOT), especially for young farmers who have skills in cocoa, and if it is possible have graduated from agricultural high school (SPMA). Problems always arise whenever farmers are given credit; concrete results are very low, and sometimes it takes time to return the credit. This is the reason why Supriyatno intensified the TOT.

The young farmers are then put in two districts which are now becoming the demonstration clusters. "They have to be local residents, not outsiders," said Supriyatno. In the implementation of TOT, Supriyatno



1. A farmer is checking his cocoa beans being dried.

2. Marketing and standard quality training for farmers in West Tapalang sub district.

The province also has the advantage of people who have known how to grow cocoa for a long time. *However, it does not guarantee that it improves farming management system, or soil fertility.*



Sinar Andau fermentation warehouse, Polewali Mandar. One example of Sulbar's huge effort in promoting fermentation.



invite implementers from other sectors such as banking (Bank Indonesia), education, and government.

Farmers who attended TOT will begin their employment by completing all requirements which needed by a cluster in developing cooperation with a bank (BNI is requested by Disbun to support this activity). Then they will analyse the size of the farms, counting the cocoa trees that still productive or need to be rehabilitated. "They will also check whether the farm is certified or not," added Supriyatno.

After this, they will form smaller clusters, such as villages, where farmers will develop a work plan. The work plan aims to change people habits from constantly using pesticides to be more eco-friendly habits. Starting from ideal pruning, burying rotten fruits, doing sanitation, and using compost. Fund to purchase fertilizer will be provided by bank, and must meet six conditions, namely:

- ✿ Appropriate time
- ✿ Appropriate type
- ✿ Appropriate amount

- ✿ Appropriate quality
- ✿ Appropriate price, and
- ✿ Appropriate location.

Today, approximately 3,600 ha of farm require fertilizer at the cost of Rp11 billion for one year. From that, total productivity is expected to increase 1,5 tonnes from previously only 800 kg. Supriyatno said that those actions should be regionally carried out so harmful ways in farming can be reduced quickly.

The trained farmers also need to know when is the time to harvest for each group, so they can maintain the post-harvest activities. All the crops have to go through fermentation for five days, so no more farmer sell raw beans. "I want to create a similarity in market and quality," said Supriyatno.

ADVANTAGEOUS IN MANY WAYS

Supriyatno said that premium quality would not mean anything if it was not based on economic scale, meaning that

Currently 59% of Sulbar Gross Domestic Product (GDP) comes from cocoa, *thus making 50% contribution of employment to Sulbar.*

even if the beans are premium quality, but if there are only one or two quintals of them, it would not be attractive to buyers. It is expected that of 3,600 ha, 30 to 50 tons of premium-quality beans can be produced weekly.

To rejuvenate old plants, Disbun had formed 30 groups to carry out top grafting. These groups are given facilities by Disbun so that they could work without supervision. While waiting for the cocoa to grow, community is also given intercrops such as corn; seven to eight months later all corn can be harvested. "Revenues will continue to exist for farmers," said Supriyatno.

Currently 59% of Sulbar Gross Domestic Product (GDP) comes from cocoa, thus making 50% contribu-



Ir. Supriyatno, M.M., Head of West Sulawesi State Crops Office.

tion of employment to Sulbar. With the promising cocoa price, more young people trying to make business out of it. Although this method is not recommended, they are often seen drying the beans on road sides. "A proof that there is a new movement in Sulbar cocoa industry," said Supriyatno.

READY TO FACE FREE MARKET

The point is, in increasing productivity, quality, and avoiding disease, Sulbar should improve production service facilities and to manage farms in cluster approach. By doing so it will increase community's bargaining power towards market, which ended up in community's increased welfare.

Supriyatno urges Sulbar people to professionally manage the farms, see them as commercial ventures; people need to have better accounting, understand market management, and have an organized working system. Especially at the end of 2015, ASEAN economic community would impose a free market system, which means we have to produce superior products in order to compete in the market. "Through real business activities, productivity and high quality should be achieved, and directly restore Sulbar's cocoa glory into its place," said Supriyatno concluded. ©





Dr. Ir. A. Ardin Tjatjo, M.P., Head of Utility and Infrastructure Department South Sulawesi State Crops Office.

SOUTH SULAWESI

GUARDING THE INDONESIAN COCOA INDUSTRY

Before separated from West Sulawesi, South Sulawesi (Sulsel) had had the highest cocoa production in Indonesia, which is more than 70%. Though now the area is reduced, Sulsel apparently still contribute 40% of Indonesian cocoa. Follow our conversation with Dr. Ir. A. Ardin Tjatjo, M.P., Head of Utility and Infrastructure Department South Sulawesi State Crops Office (Disbun), regarding Sulsel cocoa industry latest development.

THE ABILITY FOR SULSEL to contribute such production is most likely supported by its communities, because they are determined to continue to grow cocoa though it had run for nearly 40 years. Compared to other provinces, cocoa spread rapidly in the province because of the climate. Also, Sulsel provides many wetlands suitable for growing cocoa. "Wetlands are common in Luwu, North Luwu, East Luwu, and Wajo," said Ardin.

When first planted in the 1970s, cocoa was cultivated only in these wetlands. But in short time, added with promising cocoa price, the crop was spread across districts. Until now Luwu is still the larg-

est cocoa producer in Sulsel. "The area has reached 46,000 ha and it produced as much as 32,000 tons," said Ardin.

According to Ardin, now cocoa has been regarded as a social commodity in Sulsel, which has become part of people's lives. It means several farmers no longer make it as a main source of income. Some farmers start to run other business, such as durian and rice business, so they do not get benefit fully from cocoa. "Average land ownership in Sulsel is 0,8 ha," said Ardin.

OFF FARM ACTIVITIES

Although such trend is occurring, Sulsel still makes cocoa as a major instrument

in supporting the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic (MP3I). Off-farm activities are propagated, for example by providing opportunities for investors to build factories in Sulsel. "Recently Barry Callebaut cocoa processing factory started their operation in Makassar," said Ardin. Factories like these not only increase investment, but also improve local economy because community are involved.

The provincial government hopes that through MP3I, Sulsel will have factories which can produce finished products. It is estimated, level of chocolate consumption in Indonesia will increase in the future. Statistically, level of cho-

colate consumption Indonesia is still 0,02 kg per year per capita, far below level of consumption in other country, at least in India, a fellow Asian country.

Other actions taken by Sulsel through MP3I are increasing production and productivity. Then increase human resources, both government personnel and farmers, in this case government personnel as an internal target, while farmers as an external target. In addition to that, Sulsel Disbun also targeting to improve the infrastructure and facilities to support the increase in production and productivity.

AS THE MAIN BOOSTER

Beside through MP3I, all those actions have been put into a road map which is hoped to increase Sulsel's production in 2015 to be 300,000 tons. "Sulsel's production until early 2014 was still 175,000 tons, that involved approximately 290,000 families," said Ardin. If a family consists of four people, so it is currently more than one million people in Sulsel depending their livelihood on cocoa.

Ardin added that by increasing farmer group coalition's (gapoktan) ability, farmers are expected to have better access to the market. This is where Disbun becomes an intermediary, with banks and industry. Disbun will accompany gapoktan until they can access the market. The key to success in increasing production and productivity, is when farmers are sure with the market. When farmers can have a certain and transparent market, then they will earnestly perform off-farm activities. "The market acts as the main booster," said Ardin.

Currently, many ways have been done to get farmer closer to the market. Dozens of companies have made partnership with farmers, but only few have sustained. "Why? Because there is no openness in the market," said Ardin. If all parties know the price, then there will be improvement.



Barry Callebaut cocoa beans launching event to Malaysia by South Sulawesi Governor Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

THERE IS NO OTHER WAY

Almost all developed farmers in Sulsel have opened nurseries which they can sell the seedling to other farmers and make business out of it, both to farmers in Sulsel, as well as in other provinces. All the seeds produced must have a certificate from Farming Seed Quality Testing and Protection Centre (BP2MBP) to ensure that quality of the seed is good. "The task of this centre is also ensure that seeds circulated in Sulsel are certificated ones," said Ardin.

Ardin reminded that certificate given by BP2MBP is not necessarily giving farmers permission to sell their clones freely. The quality of the clones will be studied beforehand, whether suitable to be planted outside the area or not. If the quality of the clones is not suitable, the

certificate be limited to sales in particular areas. BP2MBP is one of the regional technical implementation unit (UPTD) under Disbun supervision.

Currently there are several clones suggested by Disbun, besides Sulawesi 1 and 2. Farmer developed clones such as M01, M02, and B28, which according to Ardin are clones which are suitable for Sulsel locality. "Usually farmer will do cloning themselves when they see clumps which have large production," said Ardin.

Speaking about clones, it took us on a discussion about weather anomaly. Ardin said that current anomaly has causing inconsistent production and it has also stimulating the growth of pests. In response to those problems, Ardin have called a group of researchers in Disbun to generate clones that is powerful enough

to deal with climate change. "Until that time Disbun will continue to encourage farmers to do pruning, so cocoa trees could receive sunlight as much as possible," said Ardin. In addition, fertilizing with compost should continue to run, high nutritious plants will be more resistant to disease.

Closing the conversation Ardin once again reminded that there was no other way to advance the province cocoa industry other than increasing production and productivity; continued by quality improvement and to get farmers closer to market. Ardin also hoped that more and more co-

co vocational high school (SMK) graduates would joined Disbun to help 'guarding' the road promoting this industry. "SMK graduates will become skilled professionals who have the ability to advance the cocoa industry, not only for Sulsel, but also for Indonesia," said Ardin. ©

AREA, PRODUCTION, PRODUCTIVITY, AND NUMBER OF SMALLHOLDERS PER COMMODITY PER DISTRICT, SOUTH SULAWESI (UNTIL NOVEMBER 2013)

| No. | District/City | Area (Ha) | | | | Production (Ton) | Productivity (Kg/Ha) | Number of Farmers (Family) |
|-----|---------------|-----------|---------|--------|---------|------------------|----------------------|----------------------------|
| | | TBM | TM | TT/R | Sum | | | |
| 1. | Luwu | 4,122 | 28,733 | 3,757 | 36,612 | 26,899 | 936 | 31,592 |
| 2. | Luwu Utara | 4,518 | 18,665 | 19,252 | 42,435 | 14,289 | 766 | 17,899 |
| 3. | Luwu Timur | 4,255 | 21,876 | 7,075 | 33,206 | 16,220 | 741 | 23,246 |
| 4. | Palopo | 180 | 2,987 | 196 | 3,370 | 2,815 | 942 | 2,321 |
| 5. | Tana Toraja | 844 | 2,545 | 749 | 4,138 | 881 | 346 | 13,972 |
| 6. | Toraja Utara | 665 | 1,649 | 244 | 2,558 | 1,442 | 874 | 7,554 |
| 7. | Bone | 1,306 | 25,457 | 3,942 | 30,705 | 15,664 | 615 | 40,661 |
| 8. | Soppeng | 2,429 | 14,065 | 1,364 | 17,858 | 13,564 | 964 | 23,438 |
| 9. | Wajo | 771 | 14,331 | 615 | 15,717 | 10,140 | 708 | 24,371 |
| 10. | Sinjai | 1,131 | 6,336 | 3,020 | 10,487 | 1,647 | 260 | 24,396 |
| 11. | Bulukumba | 1,875 | 5,763 | 34 | 7,672 | 5,188 | 900 | 11,374 |
| 12. | Selayar | 204 | 385 | 84 | 673 | 150 | 390 | 1,424 |
| 13. | Bantaeng | 733 | 4,644 | - | 5,377 | 2,090 | 450 | 6,432 |
| 14. | Jeneponto | 3 | 81 | 19 | 103 | 10 | 123 | 281 |
| 15. | Takalar | 5 | 39 | 1 | 45 | 24 | 615 | 201 |
| 16. | Gowa | 1,986 | 2,905 | 2,215 | 7,006 | 1,665 | 573 | 11,497 |
| 17. | Maros | 406 | 1,221 | 30 | 1,657 | 671 | 550 | 2,150 |
| 18. | Pangkep | 105 | 140 | 23 | 268 | 49 | 350 | 698 |
| 19. | Barru | 70 | 862 | 16 | 948 | 801 | 929 | 1,650 |
| 20. | Pinrang | 1,745 | 15,504 | 4,408 | 21,657 | 14,108 | 910 | 23,172 |
| 21. | Sidrap | 25 | 8,060 | 118 | 8,203 | 11,017 | 1,367 | 7,801 |
| 22. | Enrekang | 2,464 | 7,190 | 247 | 9,901 | 6,829 | 950 | 11,688 |
| | Sum | 29,842 | 183,438 | 47,409 | 260,596 | 146,163 | 797 | 287,818 |

TBM: Immature plants

TM: Producing plants

TT/R: Old plants / damaged

North Luwu Cocoa Stake Holders Meeting

TO BUILD COOPERATION AMONG STAKEHOLDERS

On last December district governments in Luwu Raya area, held a discussion attended by all cocoa stakeholders in Luwu Raya. The discussion is aimed to find similarities in managing sustainable cocoa.



PRECEDED BY H. ISKANDAR BAHARUDDIN, North Luwu Business Group Leader, who raised some discussions around cocoa in the district. H. Baharuddin said that cocoa production rate was slightly decreasing, compared to cocoa industry which was actually increasing. Some farmers are still controlled by market, when ideally, is them who should control the market.

Meanwhile Ir. H. Sam Sumastono, M.M. (Former Head of North Luwu Forestry and Plantation Agency) said that the opportunity to develop cocoa was still very wide, so access to capital, technology, and market should be broadened. According to him, North Luwu has 64,000 hectares of cocoa field entirely. Fields that have been applied with side grafting are 20,000 hectares, 12,000 hectares with top grafting. "We still have 32,000 hectares left," said H. Sam.

SAVING 250 HECTARES

In the discussion North Luwu Head of District Development Agency (Bappeda), Ir. Bambang Irawan, M. conveyed that 2014 was actually the year prepared for industry. Even so, the availability of fund is limited as it needs a very large budget. According to him, South Sulawesi is better prioritizing the industry, while education and free health programs must be reviewed.

Farmers also expressed things in this discussion. Abdul Hamid of East Luwu said, with support from MARS since 2012, about 250 hectares of cocoa fields were rescued from logging

and land transfer. Regarding cloning quality, he said that there were some who doubt certain quality because there was no label. "Entrees quality were also reduced because of the long haul," he said.

BUILDING WATER CANALS

On this occasion South Sulawesi Province State Crop Office (Disbun) reported that farmer's tendency to stop planting cocoa is getting higher, generally caused by flooding. To prevent it Disbun is planning to create sustainable funding allocation for water canals which will be built surrounding cocoa fields. On the other hand, Disbun is pioneering a financial institution for farmers and trying to remind them about the importance of having a land certificate.

Beginning in 2014 Disbun plans to encourage farmers to increase their productivity until 2,000 kg per hectare. Human resources training also continues.

A few local entrepreneurs who participated in the discussion convinced that South Sulawesi cocoa beans actually have its own uniqueness compared to other regions; South Sulawesi beans have higher melting point. Although it cannot be denied that size of South Sulawesi beans are still smaller and have higher level of waste. The entrepreneurs are also planning to establish cocoa processing industry associations in each district. ☈

PAPUA AND WEST
PAPUA PROVINCE

EMERGING LARGEST COCOA PRODUCER IN INDONESIA

Seeing the area, the two provinces have a tremendous power to produce cocoa. However, assistance to farmer needs to be done because the beans' quality that is still low and many farmers do not understand good agricultural practices. Results of such assistance is expected to improve the quality in accordance with buyer expectation.

ACCORDING TO MARIA RUMADAS, Head of Monitoring Sub-department Papua Regional Planning Office (Bappeda) whom we contacted by phone, farmers in the province have put much concerns with the quality of cocoa beans they produce. It can be seen from the water content and trash that are still high. It is certainly impacting farmers' selling price. "The price is very low in several areas," said Maria. Furthermore, lower price discourage farmers to improve the quality of their cocoa beans.

To overcome this situation, Bappeda Papua is helping the local government (pemda), in this case state crops office, to gather the community and develop a plan that is necessary to increase and to improve the quality of cocoa beans. Additionally Bappeda's mandate is to supervise any assistance activi-

ties in the farm so that each farmer can get knowledge they need quickly and accurately.

GREAT POTENTIAL

According to data from the Development Acceleration Unit in Papua and West Papua (UP4B), the two provinces have very large potential on cocoa, about 1,3 million ha. Currently only about 17,000 ha are already planted with cocoa. For Papua Province, the farms are spread in Jayapura, Keerom, and Sarmi. As for the province of West Papua, cocoa spread in Manokwari, Sorong, South Sorong, Maybrat and Raja Ampat.

Recently, both provincial governments through UP4B began promoting business planning activities to develop cocoa. The activity aimed to make a business plan and recommendations



for the development of cocoa in order to improve people's welfare.

Maria said that Jayapura district itself has established a policy that every cocoa farmer household in the future are required to have at least one ha of land in order to generate revenue of Rp5 million per month. This suggests that cocoa has been used as a major commodity in Papua. "But it is possible to have a side farming so that farmers could meet the five million," said Maria. Cocoa is chosen as the primary commodity because when it is properly cared, it can be harvested weekly.

Meanwhile there are several constraints which solutions are being sought at this time, namely:

- Cocoa cultivation practices is still traditional, farmers let the plants to grow on their own and do not tending the farm.
- Limited seed and entrées hamper planting material distribution to cocoa development areas.
- Vascular streak dieback (VSD), black pod disease and Cocoa Pod Borer (CPB) infestation are quite heavy, causing cocoa failed to bear fruit or not producing at all.
- The decline in production due to VSD and CPB attack cause marketing lead to a single buyer

(monopsony), because other buyers stopped operating.

According to Maria, mostly Papua cocoa farmers sell their beans to traders who come to their village. Then cocoa is exported through Makassar, South Sulawesi or Surabaya, East Java.

Seeing this UP4B suggests four initial programs for Papua, namely:

- ① Expanding cocoa cultivation area.
- ② Revitalization of good agricultural practices to ensure increase in production and bean quality.
- ③ Development of superior seeds and entrées.
- ④ Building cocoa farmers farming capacity with on going training.

GREAT EXPECTATIONS

Maria hoped that more large companies would invest in Papua. According to her, these companies will purchase good quality of cocoa beans in big quantity, thus indirectly stimulate farmers to produce more quality beans. In addition, indigenous people who inherit vast agricultural lands, have extraordinary power to produce cocoa. "We hope that with such power, the welfare of the Papuan will be increased and make Papua as the emerging largest cocoa producer in Indonesia," said Maria. ©

EXAMPLES OF PRODUCTION CAPACITY IN FIVE DISTRICTS

Photo: Eamon Siggins.

JAYAPURA DISTRICT

There are 386,700 ha of land suitable for cocoa cultivation. The land area of 6,342 ha been utilized with an average yield of 5,140 tons/year

SARMI DISTRICT

There are 392,675 ha of land suitable for cocoa cultivation. Land area of 1,970 ha has been utilized with an average yield of 686 tonnes/year

YAPEN ISLANDS DISTRICT

There are 19,100 ha of land suitable for cocoa cultivation. Land area of 1,926 ha has been utilized with an average yield of 1,447 tons/year

WAROPEN DISTRICT

There are 196,011 ha of land suitable for cocoa cultivation. Land area of 997 ha has been utilized with an average yield of 747 tonnes/year

NABIRE DISTRICT

There are 131,460 ha of land suitable for cocoa cultivation. Land area of 1,828 ha has been utilized with an average yield of 1,369 tons/year

SOUTH SULAWESI COOPERATIVE
AND UMKM OFFICE

SUPPORTING FARMERS IN OPENING BUSINESS

Last February CSP was welcoming a guest from South Sulawesi Cooperative and UMKM (Small and Medium Business) Office, Muh. Hasyim (Head of Capital and Financial Services), who came to give a description of the latest cooperative legislation. Here's the summary.



Head of Capital and Financial Services, Muh. Hasyim

IN THE LAST 20 YEARS since the enactment of Law (UU) No. 25/1992 about cooperative, not much has changed in the world of Indonesian cooperative. Reality on the field shows us that this law is not able to act as a tool in developing the cooperative. The main reasons are, weak provisions of the law, and lack of horizontal cooperation with other economic regulating law.

To solve the problem, the UU No. 17/2012 then came into effect in lieu of the previous UU; this renews the Indonesian cooperative law, and it is expected to realize cooperative as a strong, healthy, independent, and resilient economic organization, and can be trusted as a business entity.

The new law also reinforces government's role as policy provider, as well as cooperative's driving force so it could grow and develop properly. In taking this step, the government must respect the identity and independence of cooperative in a way not to interfere in cooperative internal affairs. "Proper implementation of the law will make Indonesian cooperative more credible and beneficial to members in particular, and society in general," said Hasyim.

THE TERMS ARE EASY

Some things have changed in the law consists of 17 chapters and 126 articles. The highlights of the changes is the solidified type of cooperatives into four types, namely:

1. Production cooperative
2. Consumer cooperative
3. Service cooperative, and
4. Saving and loan cooperative.

The four cooperatives can be explained as follows: production cooperative is a cooperative where most of the members have a production, such as cocoa, rice, or corn. Consumer cooperative is whose members are store owners, such

as groceries stores, etc. Service cooperative whose members are service providers, such as transportation, workshop, or restaurant. While saving loan cooperative only lends money, goods must not be sold in this cooperative.

The new law also gives discretion in terms of management. Previously, cooperative managers can only be recruited from members, but now, managers can also be recruited from non-members. When a cooperative is formed and none of the members is able to become a manager, then we can find someone outside the member be manager, for example an entrepreneur who deals directly with the cooperative. "But when this person is appointed as a manager, hopefully he or she will be a member of the cooperative soon," said Hasyim.

It is required at least 20 people with the same economic interests to form a cooperative. So if a farmer group (poktan) already has 20 members, then they can form a cooperative. The cooperative shall have a name, address, and administrators at least three to five people. Hasyim said that number of administrator must be an odd number, very helpful when making decisions.

Members meeting must be held once a year, usually after the fifth month. The meeting report around activities that have been done in a year including whether the cooperative is making profit or loss. Work plan for next year is to be made at this annual meeting. If a cooperative has reached 500 members, of this is comprised of several groups, is enough to bring one person to represent a group in the meeting. "So it won't be too crowded," said Hasyim.

After a year of running, the cooperative will show business surplus result (SHU) and business deficit result (DHU), where it can be seen profits from sales, operational costs, as well as other things that have happened in a year.

OFFICE IS READY TO HELP

Hasyim once again reminded that saving loan cooperative should not be coupled with a business, because this cooperative is only dealing with money instead of goods. Other cooperatives such as production, service, and consumer may be combined, in condition that each connected by an activity. For example, initially a cooperative operates as a production cooperative, but over time this cooperative creates a new business, let's say transportation services, then the production cooperative can be combined with the service cooperative.

Currently there are still a lot of saving loan cooperatives that have multiple businesses at once. With the issuance of UU No. 17/2012, activities of saving loan cooperative will be restricted, it should be stand alone and if it wants to enter into a business, a new cooperative should be established. But that does not mean limiting farmers to expand their business; with this new law, establishing a cooperative will be much easier, just attach the formation report and bring it to a notary who has been designated by the Ministry of Cooperative. Once authenticated by notary, the cooperative is officially formed. The authenticated report then taken to district/city Cooperative Office in order to publish its legal entity. After all is completed, the cooperative is able to run. "The process take maximum of two weeks," said Hasyim.

Hasyim said that the Provincial Cooperative Office is ready to assist poktan who have difficulty in forming cooperatives in their region. Please note that the poktan understand the basics in formatting a new cooperative, and they have met most of the requirements. "We are ready to provide immediate assistance on the field," said Hasyim. ☺

HERE ARE THREE SIMPLE REQUIREMENTS TO BECOME MEMBERS OF THE COOPERATIVE

- ① Prospective members are willing to provide primary deposits, in which the first payment to whatever amount: Rp100 thousand, Rp200 thousand, up to Rp1 million.
- ② A prospective member is willing to have a Cooperative Capital Certificate, it is a certificate created by a cooperative and can be worth Rp5 million to Rp10 million which interests can be purchased by members. Interest rate is to be self-determined, for example 12% or 20%. "It's similar to the stock," said Hasyim.
- ③ Hasyim added that a prospective member is willing to hold the certificate for a year, so that at maturity, the certificate will be redeemed. The advantage if you have a certificate is when you have a debt to other member, you can sell it in exchange for the debt.

If you wish to receive direct assistance, please contact:

MUH. HASYIM (Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan)

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Tel: 081524158968 / 081341833569.

National Seminar on Certification **EVALUATION AND LESSON LEARNED UNTIL DECEMBER 2013**



WE TOOK THREE PEOPLE to represent the discussion in this seminar to be highlighted in this article. Begin with Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St., Director of Quality and Standardization - Ministry of Agriculture. He gave a presentation on government policies, draft of the Minister of Agriculture regarding a sustainable cocoa system, as well as the advantages in joining certification.

Dr. Gardjita said that the government was currently designing the Indo-

nesian Sustainable Cocoa (ISCocoa) system and developing Fermented Cocoa Beans policy. He said that these policies would increase the added value and competitiveness of cocoa, in addition to increase the production, productivity, and quality of cocoa. With this system, the government also wants to reduce social and environmental damage, as well as to facilitate fair trading.

Dr. Gardjita emphasized that farmers who participate in certification

On 10 December 2013, Indonesian National Cocoa Association (INCA) Sulawesi Selatan, was holding the National Seminar on Certification which aimed to evaluate and draw lessons from certification program until the end of 2013. Evaluation was given through presentations by several experts in the cocoa sector. Here's the summary.

would get easier path to market, so as to improve the local economy. "Farmers also get premium prices," he said.

More details on ISCocoa, Dr. Gardjita said that this system was a certification program which using a risk based approach and continuous improvement. "ISCocoa is designed to monitor the changes experienced by those who receive certification, and is used to enhance the positive impact of sustainable practices in the production system," he

ISOCocoa is designed to monitor the changes experienced by those who receive certification, *and is used to enhance the positive impact of sustainable practices in the production system.*

said. Dr. Gardjita also said that ISOCocoa referred to the requirements of national and international standardization systems which were now in effect.

Reasons that Fermented Cocoa Beans policy is made are:

- Cocoa bean is one of the commodities that have great potential in increasing the national income and farmers income
- Non fermented beans are considered as low quality
- The existence of price cutting abroad, therefore price at farm level is lower than the international price
- Cocoa industry is in the state of lack of raw materials
- Market only claims for product that is in good quality and safe to eat
- The price to get certification from a certification body is still very expensive.

AN UNDERSTANDING OF CERTIFICATION

Meanwhile Prof. Sikstus Gusli of Universitas Hasanuddin, gave a presentation on Sulawesi cocoa farmers' habits and benefits of certification related to social and environmental issues. Sulawesi cocoa farmers' habits, which indirectly challenge the certification application, described by Prof. Sikstus as follows:

- Most Sulawesi cocoa farmers still

do not want to form a group, the cooperative does not exist or if it does, the system does not run

- Farmer education is still low, especially under the age of or equal to 31 years old (total of 30% are out of school, and less than 50% are only elementary school graduated)
- Many farmers who have less than one hectare of farm, or have very little number of tree
- Not familiar with written rules
- Reluctantly convey the real issues
- Still dependent on chemical fertilizers
- There are many school-age children who work in the farm
- Increasingly interested in other commodities.

According to Prof. Sikstus farmers should be given a deep understanding of certification, especially regarding its benefits to society and the environment. Certification makes a farmer to have a habit to keep record, especially related to sales and the use of cocoa production facilities. Farmers will have a better understanding about quality, more aware of health issues, the role of women, as well as the environment. "With this record, the use of production inputs will be more efficient," said Prof. Sikstus.

COMPARISON WITH COFFEE

On this occasion also presented Soetanto

to Abdoellah, a researcher from Indonesian Cocoa and Coffee Research Institute, who described the development of certification activities in the coffee sector as a comparison. In his presentation Soetanto showed that at first, coffee sector certification activities conducted by foreign certification agencies or their branches.

But in the last five years, a number of national certification agencies were accredited, such as Biocert, Sucofindo, SDS Indonesia, CCQC, Inovis, Lesos, Persada, Dispertanpang Sumatra, and Mutu Agung Lestari. All these institutions were granted accreditation by National Accreditation Committee (KAN) using ISO IEC 65. While the international certification agencies continued the sustainable coffee certification activities in Indonesia, such as Control Union, NASSA, CERES, IMO, RA, and SGS.

In the coffee sector, certification is financed by plantations, which is generally large plantations, therefore the certificate is also held by them. "For small farmers, certification is usually financed by traders or exporters, so that the certificate is also held by them," said Soetanto. The researcher says that coffee farmers have not been able to hold their own certificate because of funding constraints, network, and market. Direct contact between buyers and farmers who ignore middlemen also remains a sensitive issue in the implementation of certification. ☺



Cocoa Policy Technical Coordination Meeting 2014

EVALUATION AND FUTURE PLANS

Early this March CSP and several stakeholders were invited to attend the Cocoa Policy Technical Coordination Meeting 2014 by Musdhalifah Machmud, Assistant Deputy for State Crop and Horticulture. Igor Rangga reports.

THE FIRST DISCUSSION was about CSP Road Map. Musdhalifah who was acting as chairperson said that it was required cooperation between CSP and the government in carrying out the road map. "For all these years the government also engaged in CSP," said Musdhalifah.

In this meeting Musdhalifah asked CSP to translate the road map in Indonesian. "The discussion will become much easier," said Musdhalifah. She was hoping there would be a discussion between CSP and the government in early 2014 to discuss more about the road map. Musdhalifah reminded, beside forum, the development of cocoa should be done by all parties, including industry, finance, and agriculture.

DATA MISMATCHED

The meeting then discussed the last cocoa production data. There was a difference between government data and of the Indonesian Cocoa Association (ASKINDO). Government data until the end of 2013 was 780,000 tons, while ASKINDO 460,000 tons. Musdhalifah said that the difference was caused by how the data was retrieved. Ministry of Agriculture took the data in accordance with the existing government structure, and the data was approved by a bupati or governor. "On the field also happens that cocoa farms which function has been transferred into something else are not always reported to local government," said Musdhalifah. She added that the difference in the data does not only occur in cocoa but also other commodities such as rice and palm oil.

According to Musdhalifah data received would greatly effect on central government policy. When the approved data is received, it becomes reference to central government to make policies, including the Cocoa National Movement (Gernas) policy. Musdhalifah said if according to the data the production of an area had reached 700 kg, then the government would not provide assistance through Gernas anymore.

COCOA DAY 2014

More details on cocoa industry, Musdhalifah said that industry required not only massive promotion, but also high creativity, so that consumers would not easily get bored with the products. Because of high competition, challenges may become heavy. Musdhalifah said that government will keep cocoa industry continue to produce, so it could continue to absorb labour.

Last discussion was about Cocoa Day 2014 in September. Some participants proposed to implement the event in Makassar, South Sulawesi so that farmers could also participate. Others proposed to keep doing the Cocoa Day in Jakarta and combining it with other events, such as the Ministry of Commerce's Trade Expo, or Interfood. Musdhalifah herself agreed to do it outside Jakarta, remembering cocoa was 'owned' by all Indonesian people. "It's good that we perform the event at other than the capital city," said Musdhalifah. ©